

RENCANA KERJA

*Sekretariat Daerah
Tahun 2026*



www.setda.bogor.go.id



tu.setda@bogorkab.go.id



(021) 8754528-875429



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan ini pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor yang ditetapkan untuk kurun waktu satu tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Sekretariat Daerah sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja PD oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai selama tahun 2025 setelah evaluasi semester Pertama, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kurang sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten akan sangat kami hargai.

Demikianlah Perubahan Rencana kerja ini kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Cibinong, 16 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,


AJAT ROCHMAT JATNIKA, ST., M.Si

Pembina Utama Muda

197109071999011001

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SETDA TAHUN 2024	12
2.1. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah.....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.....	64
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	68
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja.....	72
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat	115
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SETDA.....	117
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	117
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah ..	121
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SETDA	122
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SETDA	129
BAB V PENUTUP	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Renja Teerhadap RPJMD Tahun 2025-2030	4
Tabel 1.2	Pencapaian Target Sasaran Daerah Tahun 2026	4
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.....	9
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2024	66
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2026	73
Tabel 2.4	Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	116
Tabel 3.1	Keterkaitan Program Dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	118
Tabel 3.2	Keterkaitan Program Dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026	120
Tabel 3.3	Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Nasional	121
Tabel 3.4	Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2026	122
Tabel 3.5	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2026	127
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2026.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 3



LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : Tahun 2025
TANGGAL : 2025

**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Sekretariat Daerah disusun secara simultan bersamaan dengan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga pada setiap tahapannya diharapkan terdapat konsistensi antar kedua dokumen tersebut. Tahun 2026 merupakan tahun kedua periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, dengan mengusung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”. Dengan demikian, penyusunan Renja Sekretariat Daerah tahun 2026 telah menjadi bagian penting dalam substansi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, meskipun pada saat penyusunan Renja Sekretariat Daerah tahun 2026, dokumen RPJMD masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, Renja Sekretariat Daerah secara substansi telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan sebagaimana RPJMD Tahun 2025-2029. Renja Sekretariat Daerah bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, serta tercantum dalam SIPD-RI.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (30) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renja PD menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, serta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Selanjutnya, Pasal 2 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menegaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk dokumen

perangkat daerah dan dokumen pengelolaan keuangan, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renja PD dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (24), RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari setiap perangkat daerah, dan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD. Sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen Renja yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

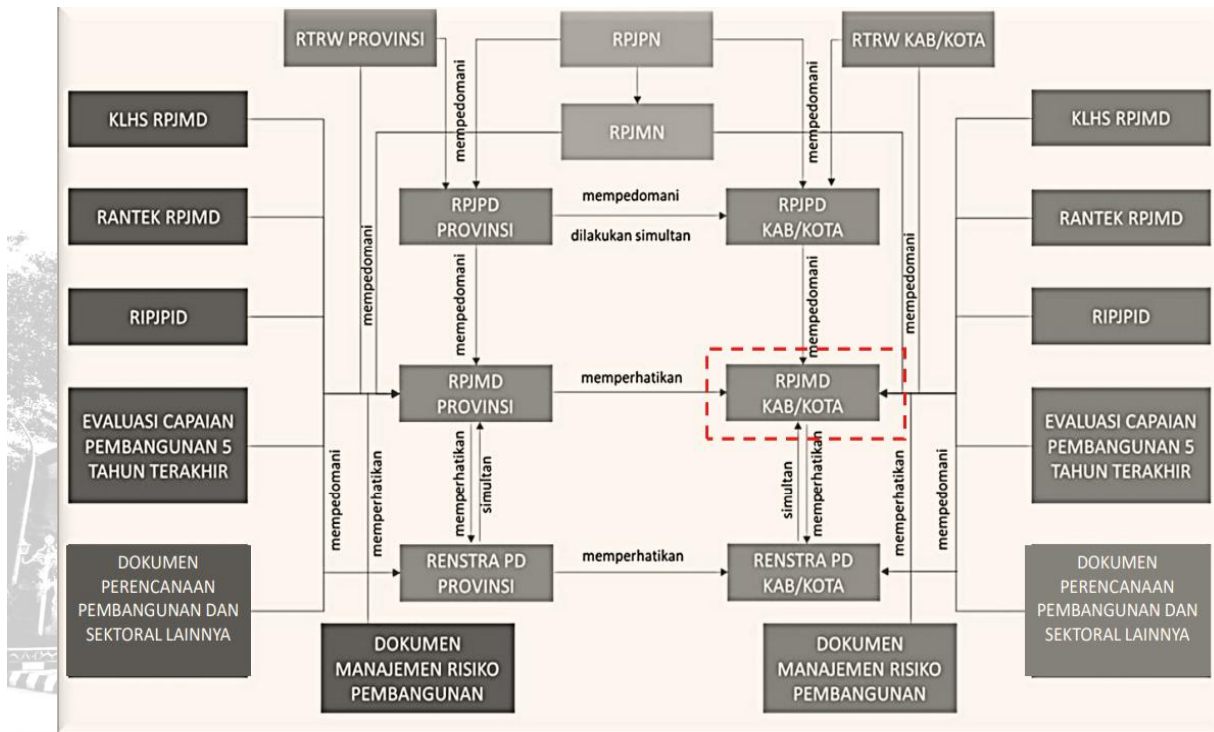
Dalam penyusunannya, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 menjadi pedoman utama. Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 regulasi tersebut merupakan pembaruan dari Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan telah mengubah struktur program, kegiatan, serta subkegiatan yang wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah sejak Tahun 2021.

Dengan demikian, penyusunan Renja PD Tahun 2026 harus mengacu pada regulasi-regulasi tersebut guna menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Renstra dan Renja PD disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintasPerangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Secara skematis dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran teknis dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk masing-masing unit kerja, yang memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Dokumen ini menggambarkan rangkaian proses perencanaan yang terarah, terencana, dan berkelanjutan sebagai respons terhadap dinamika dan tuntutan masyarakat. Dengan demikian, Renja PD menjadi alat yang penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. Secara substansi, Renja PD menerjemahkan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah ke dalam rencana tahunan, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun berjalan. Selain sebagai dokumen perencanaan, Renja PD juga memiliki fungsi sebagai instrumen evaluasi, yaitu untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan perangkat daerah dalam memenuhi target kinerja tahunan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja.

Indikator Kinerja Utama pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2026 yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor adalah

Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik di mana pada Tahun 2026 targetnya adalah 100 %, dengan Indikator Kinerja Kuncinya Persentase PD dengan Nilai RB minimal Baik dengan target pada tahun 2026 sebesar 27,8 % dan Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda dengan target pada tahun 2026 sebesar 100 %.

Tabel 1.1
Keterkaitan Renja terhadap RPJMD Tahun 2025-2030

VISI	MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang	Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara akuntabel	Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik

Fungsi Renja PD adalah menerjemahkan dan mengoperasionalkan Renstra ke dalam Program dan Kegiatan tahunan dengan target sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra. Renja menjadi alat untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah setiap tahun.

Tabel 1.2
Pencapaian Target Sasaran Daerah Tahun 2026

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN		SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PD	
		SATUAN	2026			SATUAN	2026
1	2	7	9	20	21	26	28
Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara akuntabel	Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik	%	100	Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda	%	100

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026, tidak terlepas dari Prioritas Renja Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang tidak terpisahkan dalam penyusunan KUA-PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

1.2 Landasan Hukum

Aturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2026, yaitu:

Dasar hukum yang diacu dalam pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
5. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 361);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);

32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Tujuan disusunnya Renja adalah:

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2026.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2026.
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUAPPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor ini dibagi kedalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bab ini, hal-hal yang wajib ada adalah:

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah,

keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, secara garis besar:

- aturan terkait perencanaan
- substansi kewenangan bidang urusan/unsur
- aturan vertikal yang selaras dengan kewenangan
- aturan lainnya yang terkait dan mutakhir.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud disusunnya Renja (dituliskan nama PD) Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Tujuan disusunnya Renja adalah:

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2026.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2026. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUAPPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen yang terdapat pada masing-masing bab.

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Bab ini memuat :

2.1 Capaian kinerja perangkat daerah Berupa tujuan, sasaran, program dan kegiatan 5 tahun sebelumnya, hingga tahun 2024 (2020-2024), yang telah dievaluasi pada akhir tahun masing-masing, sebagaimana format tabel 2.1 terlampir. Disamping itu, data yang harus disajikan dalam dokumen adalah indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tercapai, terlampaui, dan tidak tercapai. Jika terlampaui dan tidak tercapai, wajib menyertakan alasan. Untuk target yang tidak tercapai, wajib menyertakan upaya yang akan dilaksanakan untuk tahun 2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan (diisi nama Perangkat Daerah) Menginformasikan pencapaian kinerja perangkat daerah dengan rincian :

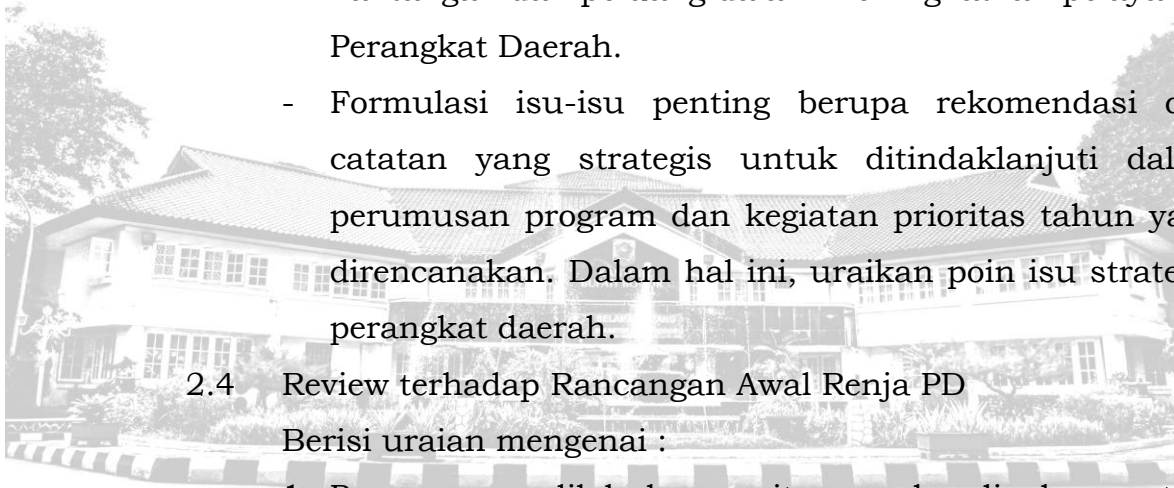
- Penjelasan naratif ketercapaian kinerja tujuan dan sasaran tahun 2025 antara target dengan capaian.
- Penjelasan naratif peningkatan, penurunan, atau tetapnya capaian (tujuan dan sasaran) tahun 2025 terhadap capaian tahun 2024, jika memiliki kinerja yang sama.
- Penjelasan naratif ketercapaian target kinerja program (outcome) tahun 2025 antara target dengan capaian.
- Penjelasan naratif peningkatan, penurunan, atau tetapnya capaian outcome tahun 2025 terhadap capaian tahun 2024 jika memiliki outcome yang sama. Penjelasan dimaksud, dituangkan pada Tabel 2.2 dengan format sebagaimana terlampir.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi (Perangkat Daerah) Bagian ini mengulas/menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Dalam hal ini, menguraikan kinerja program

yang perlu ditingkatkan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran perangkat daerah, karena belum mencapai target.

- Uraian permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam hal ini uraikan rumusan permasalahan dalam bentuk poin.
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dalam hal ini, uraikan poin isu strategis perangkat daerah.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja PD

Berisi uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal Renja PD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja PD, misalnya : terdapat rumusan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja atau program/kegiatan/sub kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Dituangkan pada Tabel 2.3 dengan format sebagaimana terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Berisi hasil kajian terhadap usulan para pemangku kepentingan yang terkait dengan kewenangan perangkat daerah.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dituangkan pada Tabel 2.4 dengan format sebagaimana terlampir.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN....(DIISI NAMA PERANGKAT DAERAH)

Bab ini berisi

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Bagian ini berisi telaahan keterkaitan antara arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional (asta cita) serta Provinsi Jawa Barat (salapan langkah) dengan kewenangan (perangkat daerah), dengan menyinergikan antara programprogram yang tengah disusun dalam Renstra Perangkat Daerah untuk tahun 2025-2029, sebagaimana format Tabel 3.1 dan 3.2 terlampir. Perhatikan pula keterkaitan pelaksanaan kewenangan perangkat daerah dengan substansi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, dan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, sebagaimana format Tabel 3.3 terlampir.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah beserta indikatornya sebagaimana telah tercantum dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai format Tabel 3.4. Sebagai penjelasan, tujuan perangkat daerah adalah apa yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahunan, sebagai implementasi dari sasaran daerah. Adapun sasaran perangkat daerah adalah implementasi tujuan tahunan perangkat daerah yang akan dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan, serta menghasilkan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi perhatian pada penyusunan Perubahan Renja tahap selanjutnya, termasuk sebagai pedoman untuk penyusunan Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026. Menjelaskan dan menguraikan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 berdasarkan :

- a. Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029
 - b. RKPD Tahun 2026 (Renja PD memedomani substansi sebagaimana tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026)
- Dituangkan pada Tabel 4.1 dengan format sebagaimana terlampir.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi perhatian pada penyusunan Renja tahap selanjutnya, termasuk pedoman untuk penyusunan RKA tahun anggaran 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

2.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 memuat rewiu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024. Dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan untuk Tahun 2026, dilakukan penelaahan terhadap realisasi capaian kinerja serta pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2020–2024. Perlu dicermati bahwa terdapat perbedaan dalam penentuan kegiatan dan sub-kegiatan pada awal periode Renstra dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2020, kegiatan dan sub-kegiatan disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing Perangkat Daerah, dalam hal ini Sekretariat Daerah. Namun mulai Tahun 2021 hingga 2024, penyusunan kegiatan dan sub-kegiatan telah mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang *Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*.

Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu untuk realisasi anggaran mencapai 97,09% sedangkan realisasi fisik mencapai 101,22%. Sekretariat Daerah melaksanakan 3 Program, 20 kegiatan dan 74 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp152.869.464.095,00. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 menghasilkan rata-rata capaian fisik sebesar 93,22%, dan realisasi keuangan sebesar 91,84% (termasuk dalam kategori predikat tinggi).

Adapun program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 12 kegiatan dan 50 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.107.584.902.348,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.104.976.581.502,- atau 97,58% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

Kegiatan pada program ini berkaitan dengan penunjang, mulai dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Penataan Organisasi, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.33.301.523.622,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.31.947.650.721,- atau 95,93% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini berisikan kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum, dan Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah.
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan, terdiri dari 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.11.983.038.125,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.11.489.623.446,- atau 95,58% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Sekretariat Daerah pada Tahun 2024 :

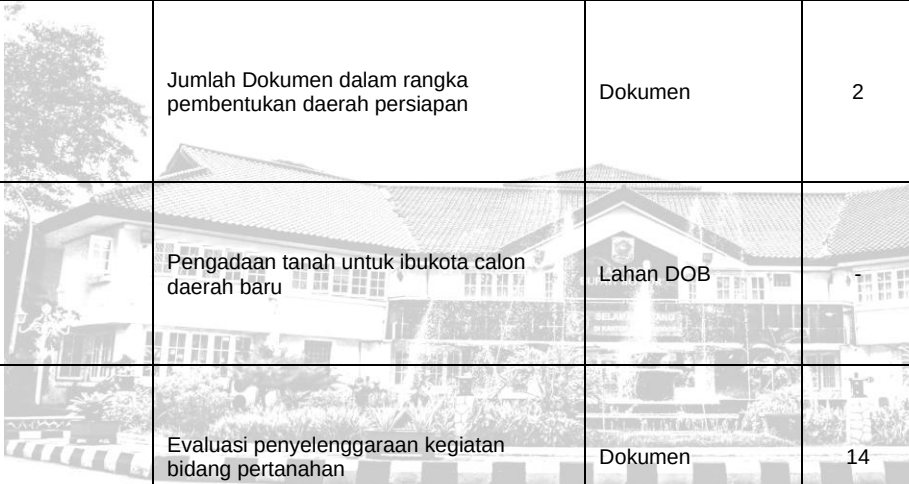
Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Urusan / Unsur : Penunjang
 Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
 Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
40					PENDUKUNG									
40	03				SEKRETARIAT DAERAH									
40	03	21			Program Koordinasi Lingkup Administrasi Pemerintahan	Rumusan Kebijakan Lingkup administrasi Pemerintahan	Rumusan kebijakan	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			1		Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Pengoordinasian Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian Penyelenggaraan Bina Wilayah	Pelaksanaan Rebo Keliling Bupati/Wakil Bupati di Kecamatan	Kecamatan	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Pelaksanaan Kegiatan Camat Berprestasi di Kabupaten Bogor	kecamatan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi infrastruktur di Kelurahan	Kelurahan	19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Pelaksanaan Rakor Kecamatan dan Kelurahan	Kali	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Pengoordinasian Penyelenggaraan Penataan Wilayah	Penataan Batas Wilayah	Kelurahan	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

						Jumlah Dokumen dalam rangka pembentukan daerah persiapan	Dokumen	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Pengadaan tanah untuk ibukota calon daerah baru	Lahan DOB		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang pertanahan	Dokumen	14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	22			Program Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Produk Hukum daerah yang diterbitkan	Produk Hukum	438	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah yang diterbitkan	Raperda	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pembentukan Produk Hukum Non Peraturan Daerah	Produk Hukum non Perda yang diterbitkan	produk hukum non Perda	476	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			3		Kajian dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kajian Peraturan Perundang-undangan	Kajian	29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Kecamatan	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Produk hukum daerah	45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	23			Program Koordinasi Lingkup Bantuan dan Penyuluhan Hukum	Persentase Permasalahan hukum yang tertangani	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Penanganan Bantuan Hukum Litigasi	Pekara Perdata yang tertangani di Kabupaten Bogor	Perkara Perdata	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

						Perkara Tata Usaha Negara yang tertangani	Perkara TUN	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Penanganan Bantuan Hukum Non Litigasi	Jumlah bantuan hukum administrasi pidana yang tertangani	Perkara	15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah penanganan masalah hukum lainnya yang tertangani	Perkara	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Penyuluhan Hukum Terpadu	Jumlah penyelenggaraan penyuluhan hukum	Kali	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Terselenggaranya Rakor RAN HAM di Kabupaten Bogor	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah penyelenggaraan penyuluhan RAN HAM	Kali	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			4		Penyelesaian Bantuan Hukum Terpadu		Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			5		Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bogor		Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	24			Program Koordinasi Lingkup Kesejahteraan Rakyat	Rumusan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat	Rumusan Kebijakan	14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pengoordinasian Penyelenggaraan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelaksanaan penyelenggaraan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Kegiatan	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian Penyelenggaraan Bidang Kemasyarakatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kesra	Dokumen	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	25			Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Kegiatan	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			1		Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Bogor	Qori dan Qoriah yang terpilih	Orang	53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian Penyelenggaraan Bina Mental dan Kerohanian	Jumlah Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Pondok Pesantren yang mengikuti Eco Pontren Award	kegiatan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Penyelenggaraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Lingkup Keagamaan	Pelaksanaan penyelenggaraan dialog aspirasi masyarakat lingkup keagamaan	Kali	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			4		Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah Kabupaten Bogor	Pemberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Bogor	Kloter	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Bogor	Kloter		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			5		Pengelolaan Data Hibah Sarana Keagamaan	Pelaksanaan Pengelolaan Data calon penerima hibah sarana keagamaan	Kecamatan	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan di Kabupaten Bogor	Orang	520	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			6		Pengelolaan Masjid Agung dan Masjid Besar Kabupaten Bogor	Pelaksanaan Pengelolaan Masjid Agung dan Masjid Besar Kabupaten Bogor yang terkelola	Mesjid	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	27			Program Koordinasi Lingkup Perekonomian	Jumlah BUMD Sehat	BUMD	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Rumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian	Rumusan Kebijakan	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pengoordinasian Penyelenggaraan Bina Badan Usaha Milik Daerah	Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

						Rumusan Kebijakan BUMD	Rumusan	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Dokumen	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Rumusan Kebijakan pengelolaan sumber daya alam	Rumusan	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Pengoordinasian Penyelenggaraan Dunia Usaha dan Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Dunia Usaha Dan Penanaman Modal	Dokumen	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	28			Program Koordinasi Lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan	Rumusan Kebijakan Lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan	Rumusan Kebijakan	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pengoordinasian Penyelenggaraan Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil perumusan perencanaan administrasi kegiatan pembangunan	Dokumen	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

					Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Standar Harga	Kali	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Pengoordinasian Penyelenggaraan Pengendalian Pembangunan	Dokumen hasil penyelenggaraan kegiatan pengendalian pembangunan	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	29			Program Penyusunan Kerjasama Pemerintah	Kerjasama Daerah	Kerjasama Daerah	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Penyusunan Kerjasama Pemerintah	Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pemerintah	Dokumen	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Penyusunan Kerjasama Non Pemerintah	Pelaksanaan Kerjasama non Pemerintah	Dokumen	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			3		Penyusunan Evaluasi Kerjasama	Pelaksanaan Penyusunan Evaluasi Kerjasama	Dokumen	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	29			Program Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Selesai Sesuai Permohonan dari Perangkat Daerah	Persen	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pengoordinasian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah Laporan terkait dengan Pengoordinasian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Bogor	Dokumen	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pelaksanaan Pengoordinasian Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Pengoordinasian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa	Dokumen	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	15			Program Pengelolaan Rumah tangga dan Protokol Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang berkualitas untuk Seluruh Pegawai	%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis rekening yang dibayarkan	Jenis	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang tersedia	Jenis	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			4		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk tamu pemerintah daerah dan pejabat negara	Porsi	77,437	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			15		Penyediaan Sewa Tempat	Penyediaan akomodasi untuk tamu pemerintah daerah dan kegiatan di luar kantor	Kali	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			30		Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Jumlah pengelolaan dan pengadministrasian barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah	Dokumen	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			32		Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan dan penerima tamu di lingkup Sekretariat Daerah	Orang	37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			33		Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Orang	66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia	Jenis	32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			63		Pembangunan Penunjang Gedung Kantor	DED Rehab Gedung PUSDAI		-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			70		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas		-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			71		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Jenis	14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			72		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Jenis	14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			74		Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	Jenis	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			75		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah kebutuhan barang cetakan yang tersedia	Jenis	31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			76		Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Jumlah gedung yang instalasi listrik dan telekomunikasinya tersedia	Gedung	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			90		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Rumah dinas	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			115		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Gedung	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			116		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantor	Jumlah gedung penunjang kantor yang dipelihara	Gedung	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			117		Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor	Jumlah gedung penunjang kantor yang dipelihara	Area	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			118		Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional/Jabatan yang dipelihara	Unit	202	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			119		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			120		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jenis	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			121		Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jaringan listrik, komputer dan komunikasi yang dipelihara	Jaringan	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			141		Penyelenggaraan Protokoler	Jumlah kegiatan keprotokoleran	Kegiatan	209	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			143		Pengelolaan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Kepda/Wakepda yang terfasilitasi	Jenis	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			145		Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah media publikasi	Media	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	32			Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rumusan kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	rumusan kebijakan	19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pengoordinasian perumusan penataan kelembagaan perangkat daerah	Jumlah rumusan penataan kelembagaan perangkat daerah	Raperda/Raperbup	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian perumusan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah rumusan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rumusan	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

						Jumlah dokumen ketatalaksanaan	Dokumen	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Pengoordinasian Penyelenggaraan ANJAB dan ABK	Jumlah dokumen penyelenggaraan ANJAB/ABK	Dokumen	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	16			Program Pengelolaan Ketatausahaan Sekretariat daerah	Index Pelayanan Kesekretariatan	Persen	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Pengadministrasian dokumen dan arsip surat masuk dan keluar di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor	Dokumen	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Pengadministrasian tata usaha pimpinan	TU Pimpinan	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			10		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja Sekretariat Daerah	Dokumen	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			15		Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Sekretariat Daerah	Dokumen	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			20		Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kerja dan strategis Sekretariat Daerah	Dokumen	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			25		Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah pelaksanaan pengajian bulanan, ramadhan dan mingguan	Kali	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah pelaksanaan olahraga rutin mingguan	Kali	18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			30		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Setda	Dokumen	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			35		Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Pengiriman peserta bimtek	Orang	16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			40		Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkup Sekretariat Daerah	Dokumen	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			100		Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan MCU pegawai	Kali	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	17			Program Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Target	Persen	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Pengelolaan belanja perjalanan dinas dalam/ luar daerah dan luar negeri untuk pimpinan dan ASN lingkup Setda	Jenis	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			5		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun dan laporan semesteran Sekretariat Daerah	Dokumen	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			10		Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			15		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	Orang	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	26			Program Penyusunan Kajian Strategis	Rumusan Kajian Strategis	dokumen	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Penyusunan Kajian Strategis	Dokumen Kajian Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan kesejahteraan Rakyat	Dokumen	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Dokumen Kajian Bidang Administrasi dan Keuangan	Dokumen	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	33			Program Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rumusan Kajian Strategis	Dokumen	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			1		Pengoordinasian Penyusunan Akuntabilitas Kinerja daerah	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan terkait dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan terkait dengan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Pengoordinasian Pengelolaan Statistik	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan terkait dengan pengelolaan statistik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor	Dokumen	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Administrasi yang mencapai target	Persen	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	N/A
						Persentase Kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	Persen	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	N/A
						Persentase kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	Persen	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	N/A

						Persentase Fasilitas keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan yang terlaksana	Persen	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	N/A
						Persentase Penyelenggaraan bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga yang terlaksana	Persen	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	N/A
						Persentase Kebijakan di bidang Penunjang Urusan Pemerintahan yang terlaksana	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100
						Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup penunjang urusan pemerintahan dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100
						Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	N/A	N/A	100	N/A	100	100	100
4	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	14	14	14	14	14	100

				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja dan Strategis Sekretariat Daerah	Dokumen	N/A	3	3	3	6	6	100
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	100
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	100
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	100
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	100
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKjIP, LKPJ, dan LPPD)	Dokumen	N/A	3	3	3	3	3	100

				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan kinerja bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	Dokumen	N/A	4	4	4	4	4	100
4	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Dokumen	N/A	10	10	10	10	10	100
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bagi ASN	ASN	N/A	269	269	300	300	224	74.66666667
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diverifikasi (Pengesahan SPJ, dan SPM)	Dokumen	N/A	2	2	2	2	2	100
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen laporan akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun	Dokumen	N/A	2	2	2	2	2	100
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	100

				06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen tanggapan hasil pemeriksaan	Dokumen	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	N/A	16	16	16	16	16	100
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	100
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	3	3	3	3	3	100
				01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	100
				05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pengelolaan Barang Daerah	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	100

				06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Data barang milik daerah di lingkup Setda	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	100
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Dokumen	N/A	8	8	8	8	8	100
				01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Pegawai	N/A	269	269	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	N/A	N/A	N/A	12	12	12	100
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pimpinan dan ASN lingkup Sekretariat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

						Jumlah Pakaian Korpri Pimpinan dan ASN lingkup Sekretariat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkup sekretariat Daerah	Dokumen	N/A	269	269	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	N/A	N/A	6	6	6	100
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	N/A	7	7	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		N/A	N/A	N/A	1	1	1	100

				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		N/A	N/A	N/A	N/A	30	201	670
				10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknik implementasi Peraturan Perundang-undangan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Sekretariat Daerah yang Terselenggara	Dokumen	N/A	9	9	9	9	9	100
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yang Instalasi Listrik dan Telekomunikasi yang tersedia	Gedung	N/A	6	6	1	6	6	100

				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	Jenis	N/A	15	15	45	15	15	100
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang Tersedia	Jenis	N/A	4	4	13	4	4	100
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan yang Tersedia	Jenis	N/A	45	45	1	45	45	100
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu yang terfasilitasi	Porsi	N/A	25,169	25,169	1	1	1	100
						Jumlah Penyediaan Akomodasi untuk Tamu Pemerintah Daerah	Kegiatan	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Jenis	N/A	3	3	3	3	3	100
				10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	100
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara	Dokumen	N/A	2	2	-	1	1	100
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	N/A	1	2	-	3	3	100

				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				11	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang tersedia	Dokumen	N/A	4	4	30	30	30	100
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis dokumen surat menyurat yang dilayani	Jenis	N/A	2	2	2	2	2	100

				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang dibayarkan	Jenis	N/A	4	4	1	4	4	100
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	100
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor Yang Tersedia	Jenis	N/A	18	18	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Tenaga Administrasi	Orang	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah tenaga keamanan	Orang	N/A	37	37	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Tenaga Kebersihan	Orang	N/A	64	64	N/A	N/A	N/A	N/A

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	N/A	 1	4	4	100
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Dokumen	N/A	5	5	5	5	4	80
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Unit	N/A	6	6	 6	6	6	100
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Unit	N/A	256	256	256	256	256	100
				05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang terpelihara	Jenis	N/A	5	5		5	5	100
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

						Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Perlengkapan rumah jabatan/dinas yang tersedia		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Gedung	N/A	1		1	1	1	100
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani	Dokumen	N/A	4	4	4	4	3	75
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	N/A	12	12	12	12	12	100
				02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jenis	N/A	5	5	12	12	12	100
				03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

				04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	N/A	12	12	12	12	12	100
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah yang terselenggara	Dokumen	N/A	3	3	3	3	2	66.67
				01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bulan	N/A	12	12	12	12	12	100
				02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan	N/A	12	12	12	N/A	N/A	N/A
				03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bulan	N/A	12	12	12	12	9	75

								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	13	13	12	13	13	100
				01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan terkait dengan Penyelenggaraan ANJAB dan ABK	Dokumen	N/A	13	13	8	8	8	100
						Jumlah Rumusan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Raperda/Raperbup	N/A	4	4	5	3	3	100
				02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Rumusan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen	N/A	5	5	2	1	1	100
				03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kebijakan Teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	N/A	1	1	1	3	3	100

				04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Dokumen	N/A	1	1	2	1	1	100
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Aplikasi e-SAKIP	Aplikasi	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Laporan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	Dokumen	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	Dokumen	N/A	2	2	2	2	2	100
				01	Fasilitasi Keprotokolan	Dokumen pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	100

				02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bahan Informasi pimpinan daerah	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	100
						Naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersusun	Naskah	N/A	530	530	N/A	N/A	N/A	N/A
				03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kali	N/A	40	40	N/A	40	40	100
						Terlaksananya Kegiatan Publikasi	Kali	N/A	6	6	1	N/A	N/A	N/A
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100

						Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A
						Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A
						Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100
4	01	02	2.01		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Rumusan Kebijakan lingkup Administrasi Pemerintahan	Rumusan	N/A	4	4	3	4	4	100
				01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah	Dokumen	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah dokumen laporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dokumen	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A

						Dokumen Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	N/A	N/A	N/A		5	5	100
				02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kegiatan Rebo Keliling Bupati/Wakil Bupati Bogor (Saba Desa)	Kecamatan	N/A	20	20	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah kegiatan evaluasi pertanahan	Kegiatan	N/A	16	16	N/A	N/A	N/A	N/A
						Monitoring evaluasi kelurahan	Kelurahan	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	3	3	3	100

				03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah	Dokumen	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen LPPD dan ILPPD	Dokumen	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A		1	1	100
4	01	02	2.02		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat	Dokumen	N/A	7	7	7	3	3	100
				01	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	N/A	5	5	5	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100

				02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Lembaga Keagamaan yang Menerima Bantuan	Lembaga	N/A	6	6	6	N/A	N/A	N/A
						Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Sosial	Dokumen	N/A	5	5		N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	N/A
				03	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen hasil Pelaksanaan Pengelolaan Data Calon Penerima Hibah Sarana Keagamaan	Dokumen	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A
						Dokumen hasil Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Bina Mental dan Kerohanian	Dokumen	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan di Kabupaten Bogor	Lembaga	N/A	193	193	N/A	N/A	N/A	N/A

						Pelaksanaan Pengelolaan Masjid Agung dan Masjid Besar Kabupaten Bogor yang dikelola	Masjid	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A
						Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi	Kegiatan	N/A	2	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	N/A		2	N/A	6	6	100
4	01	02	2.03		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah peraturan perundang - undangan yang diterbitkan	Produk hukum	N/A	473	1185	395	395	892	100
						Jumlah Perkara yang dibantu penyelesaiannya	Perkara	N/A	34	135	35	45	36	100
				01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Produk Hukum Penetapan yang diterbitkan (Kepbup)	Kepbup	N/A	519	519	N/A	N/A	N/A	N/A

						Produk Hukum Pengaturan yang diterbitkan (Perbup)	Perbup	N/A	127	127	N/A	N/A	N/A	N/A
						Rancangan Peraturan Daerah yang diterbitkan	Raperda	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	 Dokumen	N/A	N/A	N/A	 395	750	892	100
				02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Perkara Perdata yang Tertangani	Perkara	N/A	21	21	N/A	N/A	N/A	N/A
						Perkara TUN yang tertangani	Kali	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A
						Dokumen Laporan Rakor RANHAM	Dokumen	N/A	11	11	N/A	N/A	N/A	N/A

						Penyuluhan RANHAM	Dokumen	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A
						Penyuluhan Hukum	Dokumen	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A
						Bantuan Hukum di Luar Pengadilan	Perkara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus	N/A	N/A	N/A	35	35	36	100
				03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Kajian Peraturan Perundang-undangan	Kajian	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A

						Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peserta	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A
							Produk hukum	N/A	100		N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	N/A	N/A	N/A		395	898	100
4	01	02	2.04		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dihasilkan	Kerjasama	N/A	42	42	34	34	138	100
				01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Pelaksanaan kerjasama Non Pemerintah Dalam Negeri	Kerjasama	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	N/A
						Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan Dalam Negeri	Kerjasama	N/A	16	16	N/A	N/A	N/A	N/A

						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	N/A	N/A	N/A	 34	70	340	100
				02	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Pelaksanaan Kerjasama dengan Luar Negeri	Kerjasama	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	N/A	N/A	N/A	 0	0	N/A	N/A
				03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Pelaksanaan Penyusunan Evaluasi Kerjasama	Dokumen	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Dokumen	N/A	N/A	N/A	27	18	25	100
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan SDA yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A

						Persentase kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A
						Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A
						Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana		N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100
						Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi		N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Rumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian	Rumusan/Dokumen	N/A	10	10	3	3	3	100
						Jumlah BUMD yang sehat	BUMD	N/A	4	4	4	4	5	100

				01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pembinaan BUMD dan BLUD	Dokumen	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Rumusan Kebijakan BUMD dan BLUD	Rumusan	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	N/A	N/A	N/A		1	1	100
				02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Dokumen	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Rumusan kebijakan di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian	Rumusan	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	N/A			1	1	1	100

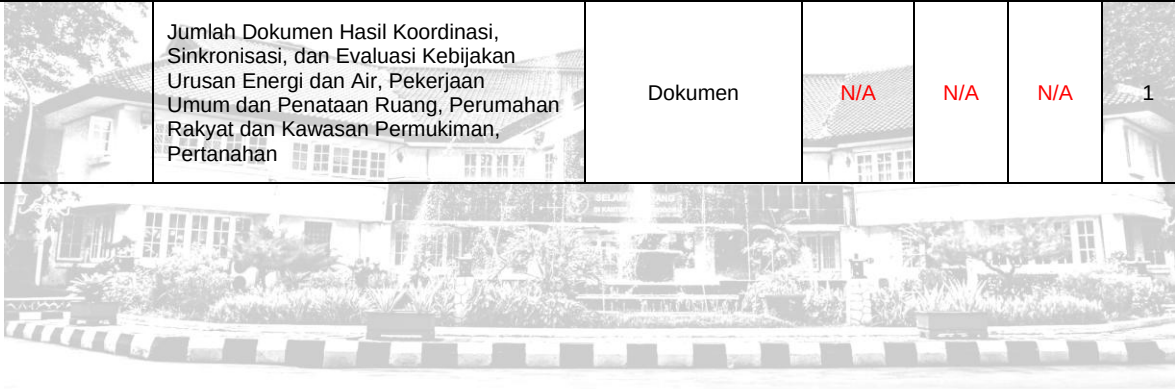
				03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Dokumen	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Rumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Rumusan	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	N/A				1	1	100
4	01	03	2.02		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Rumusan Kebijakan Lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan	Dokumen	N/A	3	3	3	3	3	100
				01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	3	3	3	100

				02	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Dokumen	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	N/A	N/A	N/A	 1	5	5	100
				03	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Pengendalian Pembangunan	Dokumen	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	N/A	N/A	N/A	3	3	3	100
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari Perangkat Daerah	%	N/A	97.85	97.85	96	98	94	100
				01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	Dokumen	N/A	8	8	8	N/A	N/A	N/A

						Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100
				02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengoordinasian Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengoordinasian Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	N/A	8	8		N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	N/A	N/A	N/A		4	4	100
				03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa	Dokumen	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	N/A	N/A	N/A	300	110	110	100
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Rumusan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam	Dokumen	N/A	1	1	3	3	3	100

				01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, dan perikanan	Dokumen	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Rumusan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, dan perikanan	Rumusan	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	1	1	100
				02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup	Dokumen	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Rumusan kebijakan di bidang sumber daya alam lingkungan hidup	Rumusan	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A
				03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam energi dan air	Dokumen	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A

						rumusan kebijakan di bidang sumber daya alam energi dan air	Rumusan	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	1	1	100



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

1. Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024, diketahui bahwa target untuk Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah ditetapkan sebesar Nilai 69,62 berhasil direalisasikan sebesar Nilai 101,842. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja melebihi target, dengan tingkat capaian melebihi 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 berjalan dengan baik.
2. Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan pada tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a. Persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik ditetapkan target sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 101,84%;
 - b. Persentase Perangkat Daerah dengan ketercapaian kinerjanya kategori tinggi ditetapkan target sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.
3. Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi General ditetapkan target sebesar 66,51 Nilai dengan tingkat capaian sebesar 74,428 Nilai atau 111,68% dari target yang ditetapkan;
 - b. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik target ditetapkan sebesar 14,32 Nilai dengan tingkat capaian sebesar 9,85 Nilai atau 68,78% dari target yang ditetapkan;
 - c. Persentase Ketercapaian Indikator RB General dan RB Tematik kewenangan Sekretariat Daerah ditetapkan sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 124,43%;

- d. Persentasi Realisasi Kinerja Utama Perangkat Daerah Kategori Baik ditetapkan sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.
4. Secara garis besar indikator pada masing-masing tujuan, sasaran dan kinerja Sekretariat Daerah sudah mencapai dari target yang telah ditetapkan. Namun, terdapat indikator kinerja Perangkat daerah yang belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Tematik. RB Tematik Kabupaten Bogor Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -3,45 poin. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan penggunaan produk dalam negeri. Penurunan poin RB tematik terjadi pada hampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat, akibatnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengalami penurunan skor, yang disebabkan oleh beberapa hal:
- a. Delta penurunan angka kemiskinan sangat kecil, dampaknya belum signifikan;
 - b. Evaluator stunting masih menggunakan data yang belum mencerminkan kondisi terbaru;
 - c. Inflasi tidak terkendali, bahkan terjadi deflasi;
 - d. Investasi belum optimal, sebagian daerah justru mengalami penurunan.
- Oleh karena itu skor capaian dampak tematik di Pemerintah Kabupaten Bogor mengalami penurunan karena dinilai tidak memberi pengaruh signifikan bagi masyarakat. Berikut skor capaian dampak tematik:
- a. Pengentasan Kemiskinan: dari 1,48 → 1,44;
 - b. Pengendalian Inflasi: dari 2,49 → 0 (Kriteria Belum Baik);
 - c. Penanganan Stunting: dari 2,2 → 0,75; dan
 - d. Penggunaan Produk Dalam Negeri: dari 2,92 → 2,15.
- Adapun pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah hingga Tahun 2024

Urusan / Unsur : Penunjang
Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
PENDUKUNG									
SEKRETARIAT DAERAH									
TUJUAN PD									
1	Perangkat daerah yang memiliki nilai AKIP minimal baik	%	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A
2	Nilai Rata-Rata AKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	68.36	69.62	101.843
SASARAN PD									
1	Kontribusi BUMD terhadap penerimaan pembiayaan daerah	%	3.49	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase rancangan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	23.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Kualitas penyusunan LPPD	Nilai	3.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase penyelesaian kasus tanah	%	79.07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah DOB	DOB	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang diterbitkan	%	99.52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Persentase permasalahan hukum yang ditangani	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Persentase evaluasi capaian kinerja yang ditindaklanjuti	%	33.33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Persentase kerjasama yang di implementasikan	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Persentase pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari PD	%	97.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Rata-rata IKM perangkat daerah diatas 76.61	%	86.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Persentase implementasi hasil ANJAB dan ABK	%	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Rata-rata nilai AKIP perangkat daerah diatas 60	%	71.68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Jumlah Kajian Strategis yang rekomendatif	%	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Persentase lembaga keagamaan yang dilayani	%	90.63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik	%	N/A	86.11	87.5	97.33	N/A	N/A	N/A
18	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	3.26	N/A	N/A	N/A
19	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	N/A	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	N/A	N/A	N/A
20	Persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik	%	N/A	N/A	N/A	N/A	90.38	100	110.643
21	Persentase Perangkat Daerah dengan ketercapaian kinerjanya kategori tinggi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100
22	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	66.51	74.28	111.682
23	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	14.32	9.85	68.784
24	Persentase Ketercapaian Indikator RB General dan RB Tematik kewenangan Sekretariat Daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	124.43	124.43
25	Persentasi Realisasi Kinerja Utama Perangkat Daerah Kategori Baik	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor sebagai unsur yang menyelenggarakan fungsi pengoordinasian, perumusan kebijakan, fasilitasi administrasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perangkat daerah, memerlukan penyusunan perencanaan yang didasarkan pada identifikasi isu-isu strategis. Analisis isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta menggunakan pendekatan *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)* untuk memahami peluang dan tantangan yang ada. Identifikasi isu ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program prioritas Sekretariat Daerah untuk periode mendatang.

Lingkup analisis mencakup evaluasi terhadap Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas internal Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan penyusunan kebijakan;
2. Kualitas sumber daya aparatur dan manajemen kelembagaan;
3. Dinamika lingkungan eksternal, termasuk regulasi pusat, kebijakan provinsi, serta kondisi sosial dan ekonomi daerah;
4. Dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan pimpinan, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Hasil Analisis Internal dan Eksternal terhadap Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dapat dikelompokkan yaitu :

1. Faktor Internal
 - a. Kekuatan (Strengths):
 - 1) Jumlah ASN relatif mencukupi.
 - 2) Fungsi strategis Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan kebijakan.
 - 3) Akses langsung terhadap pimpinan daerah sebagai basis pengambilan keputusan cepat.
 - b. Kelemahan (Weaknesses):

- 1) Kompetensi ASN belum sepenuhnya sesuai kebutuhan jabatan.
- 2) Belum seluruh unit memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 3) Lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- 4) Koordinasi lintas perangkat daerah belum berjalan optimal.
- 5) Pengelolaan sarana dan prasarana belum efisien.
- 6) Kinerja dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih belum profesional.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities):

- 1) Dukungan regulasi desentralisasi memberikan kewenangan lebih luas dalam pengambilan kebijakan.
- 2) Peningkatan peran digitalisasi pelayanan pemerintahan.
- 3) Kesempatan membangun sinergi dengan BUMD dan sektor swasta untuk percepatan pembangunan.

b. Ancaman (Threats):

- 1) Perubahan kebijakan pemerintah pusat yang cepat dan kompleks.
- 2) Ketimpangan sosial dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
- 3) Lemahnya sinergi dengan pelaku usaha lokal dalam menghadapi pasar bebas.
- 4) Isu sosial dan keagamaan yang berpotensi menciptakan ketegangan horizontal.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh sebelas isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan program dan kegiatan lima tahunan ke depan:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi perumusan dan koordinasi kebijakan daerah yang mampu menyelesaikan permasalahan pemerintahan lintas sektor.
- b. Kapasitas dan kompetensi ASN yang belum memadai, khususnya dalam perumusan kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen koordinasi.

- c. Belum seluruh unit kerja memiliki SOP/SPM, sehingga pelaksanaan tugas belum berbasis standar pelayanan dan prosedur kerja yang baku.
- d. Koordinasi lintas perangkat daerah dan antara SKPD-BUMD belum optimal, menghambat sinkronisasi pencapaian target pembangunan.
- e. Kualitas pelayanan kesekretariatan terhadap pimpinan daerah belum optimal, terutama dalam aspek responsif, ketepatan waktu, dan dukungan teknis.
- f. Pengelolaan dan inventarisasi sarana dan prasarana belum efisien, sehingga menurunkan produktivitas dan efektivitas kinerja aparatur.
- g. Masih lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan tindak lanjut hasil evaluasi.
- h. Dinamisnya perubahan regulasi pusat menuntut fleksibilitas dan kesiapan organisasi dalam merespons perubahan.
- i. Tingginya risiko hukum dan kasus-kasus aparatur, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan dan advokasi hukum.
- j. BUMD belum sepenuhnya menjalankan prinsip good corporate governance, sehingga diperlukan pembinaan, pembenahan SDM, dan penguatan bisnis.
- k. Belum tersedia kebijakan afirmatif yang mendukung pelaku usaha lokal, khususnya dalam menghadapi persaingan pasar daerah dan nasional.

Untuk menjawab berbagai isu strategis tersebut, arah penanganan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas ASN melalui pelatihan tematik, sertifikasi kompetensi, dan penempatan berbasis uji kompetensi jabatan.
2. Penyusunan dan standarisasi SOP/SPM seluruh bagian dan biro Sekretariat Daerah.
3. Digitalisasi proses koordinasi, pelayanan, dan pengelolaan data, termasuk pemanfaatan dashboard pengendalian kebijakan dan sarpras.
4. Revitalisasi sistem koordinasi lintas perangkat daerah dan BUMD berbasis rencana kerja tematik terpadu.

- Reformulasi regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat.
 - Pembinaan menyeluruh terhadap tata kelola BUMD, dengan fokus pada efisiensi bisnis dan sinergi pembangunan daerah.
 - Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, berbasis data dan indikator kinerja.
 - Pembentukan unit responsif regulasi, untuk menyesuaikan kebijakan daerah terhadap dinamika kebijakan nasional.
 - Pengembangan sistem advokasi dan perlindungan hukum bagi aparatur, serta peningkatan kesadaran hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
- Selain itu adanya isu-isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dalam penyusunan Renstra 2025-2029 dikaji permasalahan-permasalahan dari setiap permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yang dituangkan dalam Sebagai berikut :

Isu Strategis	Tujuan Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Fungsi perumusan dan koordinasi kebijakan belum optimal	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah yang terintegrasi dan solutif	Penguatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi lintas PD	Penyusunan kebijakan strategis; Forum koordinasi lintas sektor
Kapasitas ASN belum memadai	Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Sekretariat Daerah	Penguatan manajemen talenta dan peningkatan kapasitas aparatur	Pelatihan teknis ASN;
SOP dan SPM belum tersedia di semua unit	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas berbasis standar kerja	Standarisasi prosedur kerja seluruh unit Sekretariat Daerah	Penyusunan SOP/SPM; Bimtek implementasi SOP
Koordinasi lintas PD dan BUMD belum optimal	Memperkuat sinergi pembangunan daerah antar institusi	Integrasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan SKPD dan BUMD	Rapat koordinasi terpadu; Perjanjian kinerja bersama BUMD
Pelayanan terhadap pimpinan daerah belum optimal	Meningkatkan pelayanan administrasi dan kesekretariatan pimpinan	Digitalisasi dan pemantapan layanan protokoler dan kesekretariatan	Penyediaan layanan berbasis digital; Penguatan SDM pelayanan
Sarana dan prasarana belum terkelola baik	Meningkatkan dukungan sarana kerja yang fungsional dan efisien	Optimalisasi pengelolaan aset dan infrastruktur penunjang kerja	Digitalisasi inventarisasi; Rehabilitasi sarpras kantor
Pemantauan dan evaluasi belum sistematis	Meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja kebijakan	Pengembangan dashboard kinerja; Penyusunan laporan evaluatif reguler
Dinamisnya regulasi pusat	Meningkatkan adaptabilitas kelembagaan terhadap perubahan regulasi	Sinkronisasi cepat terhadap regulasi nasional	Tim responsif regulasi; Sosialisasi kebijakan baru
Risiko hukum dalam pelayanan publik	Meningkatkan kesadaran hukum dan	Penguatan fungsi advokasi dan	Pendampingan hukum internal;

	tata kelola pemerintahan bersih	pengendalian risiko hukum	Pelatihan etika administrasi
Tata kelola BUMD belum optimal	Meningkatkan profesionalisme dan kontribusi BUMD terhadap pembangunan	Pembinaan tata kelola BUMD berbasis GCG	Review kinerja BUMD; Pembinaan SDM dan reformasi BUMD
Belum ada kebijakan afirmatif pelaku usaha daerah	Mendorong daya saing pelaku usaha lokal dalam pembangunan	Penyusunan kebijakan yang berpihak pada UMKM lokal	Penyusunan regulasi afirmatif; Kemitraan SKPD–pelaku usaha lokal

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Reviu terhadap Rancangan Awal Renja dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, serta isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan dari reviu ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah telah terakomodasi secara tepat dan proporsional dalam dokumen Rancangan Awal Renja, baik dari sisi substansi maupun alokasi sumber daya. Hasil reviu terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2026 untuk Sekretariat Daerah menunjukkan bahwa secara substansi, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan telah sesuai dengan kebutuhan dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Adapun hasil reviu terhadap Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 secara rinci disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026

Urusan / Unsur : Penunjang
Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SEKRETARIAT DAERAH					440,160,292,235	SEKRETARIAT DAERAH					419,577,674,310	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cibinong Raya	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Poin	77.6	394,355,866,076	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cibinong Raya	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Predikat	BB	374,520,352,619	

		Cibinong Raya	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Poin	11,90			Cibinong Raya	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Poin	11,90		
		Cibinong Raya	Tingkat Implementasi Sistem Kerja	%	100			Cibinong Raya	Tingkat Implementasi Sistem Kerja	%	100		
		Cibinong Raya	Tingkat Kematangan Kelembagaan	Predikat	Sangat Tinggi			Cibinong Raya	Tingkat Kematangan Kelembagaan	Predikat	Tinggi		
		Cibinong Raya	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Administrasi Umum	%	100			Cibinong Raya	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Administrasi Umum	%	100		
		Cibinong Raya	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Administrasi Umum	%	100			Cibinong Raya	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Administrasi Umum	%	100		

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%		533,372,731	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100	1,292,399,286	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	244,272,872.60	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	618,105,618.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	61,735,764.50	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	125,749,975.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	23,098,498.23	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	59,999,850.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	36,400,202.48	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	45,754,475.00	

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	25,758,297.80	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	34,221,500.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	89,167,951.63	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	106,817,868.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	42,868,335.63	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	262,150,000.00	
Penyelenggaraan WaliData Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	10,070,808.00	Penyelenggaraan WaliData Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	39,600,000.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Persentase realisasi anggaran Sekretariat Daerah	%	100	60,084,717,916	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Persentase realisasi anggaran Sekretariat Daerah	%	100	58,421,273,856	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cibinong Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	224	59,585,867,094	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cibinong Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	224	57,794,245,484	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	258,944,940	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	343,209,918	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	38,161,965	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	56,798,518	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	67,942,274	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	75,721,486	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	108,438,579	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	128,209,075	

									an/Semesteran SKPD				
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	25,363,064	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	23,089,375	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100 (100)	15,442,211	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100	13,781,427	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Sekretariat Daerah	Dokumen	1	998,154	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Sekretariat Daerah	Dokumen	1	890,331	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Laporan	1	1,912,996	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Laporan	1	1,705,848	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	12,531,061	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	11,185,248	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	2,855,281,996	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	2,991,183,915	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cibinong Raya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	809,096,690	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cibinong Raya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	722,106,204	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	200,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	160,881,391	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	289,375,306	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	258,196,320	

		Cibinong Raya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Asesment Pegawai Lingkup Sekretariat Daerah	Laporan	1	-		Cibinong Raya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Asesment Pegawai Lingkup Sekretariat Daerah	Laporan	1	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cibinong Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	1,556,810,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cibinong Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	1,850,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	100	36,744,497,616	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	100	25,673,337,468	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cibinong Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	469,869,434	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cibinong Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	419,413,920	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cibinong Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	17,373,431,387	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cibinong Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	15,211,987,769	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cibinong Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	3,530,293,186	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cibinong Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	3,151,242,975	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cibinong Raya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	218,892,846	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cibinong Raya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	195,389,925	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Bulanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	14,852,010,763	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Bulanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	6,499,999,720	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Digitalisasi Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	300,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Digitalisasi Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	195,303,159	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Persentase Administrasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	2,550,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cibinong Raya	Persentase Administrasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	2,560,400,000	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2,550,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2,560,400,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cibinong Raya	Persentase barang milik daerah yang diadakan dengan baik	%	100	1,766,715,897	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cibinong Raya	Persentase barang milik daerah yang diadakan dengan baik	%	100	1,977,022,000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cibinong Raya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	1,706,715,897	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cibinong Raya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	1,577,022,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor operasional atau lapangan	Cibinong Raya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Bermotor operasional atau lapangan	Unit	1	60,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor operasional atau lapangan	Cibinong Raya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Bermotor operasional atau lapangan	Unit	1	400,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cibinong Raya	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	13,391,981,748	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cibinong Raya	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	12,221,775,197	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1,900,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1,606,592,526	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Layanan Internet, Layanan Selular, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4,595,926,818	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Layanan Internet, Layanan Selular, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4,459,625,344	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,486,273,103	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,326,690,715	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	5,409,781,827	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4,828,866,612	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cibinong Raya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100	249,775,465,545	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cibinong Raya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100	247,895,175,467	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cibinong Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	736,020,590	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cibinong Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	675,560,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cibinong Raya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	256	1,179,964,035	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cibinong Raya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	256	1,143,750,000	
Pemeliharaan Mebel	Cibinong Raya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	61,860,000	Pemeliharaan Mebel	Cibinong Raya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	55,217,700	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cibinong Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	246,557,656,885	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cibinong Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	245,620,646,967	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cibinong Raya	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1,238,964,035	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cibinong Raya	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200,000,000	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cibinong Raya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cibinong Raya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	200,000,800	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Persentase Layanan Medical Check Up Kepala Daerah yang Dilakukan	%	100	247,440,000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Persentase Layanan Medical Check Up Kepala Daerah yang Dilakukan	%	100	220,872,075	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	247,440,000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	220,872,075	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cibinong Raya	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terpenuhi	%	100	5,494,069,164	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cibinong Raya	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terpenuhi	%	100	3,188,640,450	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	2,450,387,301	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	1,602,087,600	

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	12	2,001,937,962	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	12	724,384,200	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	1,041,743,901	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	862,168,650	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Persentase Administrasi Gaji, Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu	%	100	11,216,531,726	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Persentase Administrasi Gaji, Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu	%	100	9,320,901,960	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	24	1,630,195,524	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	24	1,581,178,976	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	24	9,586,336,202	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	24	7,739,722,984	

	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Persentase penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	100	619,940,300	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Persentase penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	100	553,376,775	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	619,940,300	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	553,376,775	
	Penataan Organisasi	Cibinong Raya	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup organisasi	%	100	266,217,294	Penataan Organisasi	Cibinong Raya	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup organisasi	%	100	425,000,000	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Jumlah Rumusan Kebijakan Kelembagaan berupa Kepbup/Perbup Kelembagaan)	Dokumen	8	266,217,294	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Jumlah Rumusan Kebijakan Kelembagaan berupa Kepbup/Perbup Kelembagaan)	Dokumen	20	425,000,000	
		Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Kajian Kelembagaan yang tersusun	Dokumen	1	-		Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Kajian dan Naskah Akademik Kelembagaan yang tersusun	Dokumen	2	-	

	Penataan Organisasi	Cibinong Raya	Kategori Penerapan Sistem Kerja Berdasarkan SE Menpan No 15 Tahun 2023	Kategori	4,5	-	Penataan Organisasi	Cibinong Raya	Kategori Penerapan Sistem Kerja Berdasarkan SE Menpan No 15 Tahun 2023	Kategori	4,5	-	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Cibinong Raya	Jumlah rancangan Perbup/Kepbup/SE Implementasi Sistem Kerja 2025	Dokumen	1	-	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Cibinong Raya	Jumlah rancangan Perbup/Kepbup/SE Implementasi Sistem Kerja 2025	Dokumen	1	-	
		Cibinong Raya	Laporan Hasil FGD/Sharing Session	Dokumen	1	-		Cibinong Raya	Laporan Hasil FGD/Sharing Session	Dokumen	1	-	
		Cibinong Raya	Telaahan Staff sebagai bahan perumusan kebijakan Sistem Kerja Tahun 2026	Dokumen	1	-		Cibinong Raya	Telaahan Staff sebagai bahan perumusan kebijakan Sistem Kerja Tahun 2026	Dokumen	1	-	
		Cibinong Raya	Persentase kematangan kelembagaan PD pada level sangat tinggi	%	45	-		Cibinong Raya	Persentase kematangan kelembagaan PD pada level sangat tinggi	%	45	-	

		Cibinong Raya	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi dan asistensi/konseling kelembagaan	Perangkat Daerah	76	-		Cibinong Raya	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi dan asistensi/konseling kelembagaan	Perangkat Daerah	76	-	
		Cibinong Raya	Laporan Hasil Evaluasi Kematangan Kelembagaan kepada PPK dan kepada Kemendagri	Dokumen	2	-		Cibinong Raya	Laporan Hasil Evaluasi Kematangan Kelembagaan kepada PPK dan kepada Kemendagri	Dokumen	1	-	
		Cibinong Raya	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	%	100	-		Cibinong Raya	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	%	100	-	
		Cibinong Raya	Jumlah fasilitasi kepegawaian yang terpenuhi sesuai kebutuhan manajemen SDM	Kegiatan	3	-		Cibinong Raya	Jumlah fasilitasi kepegawaian yang terpenuhi sesuai kebutuhan manajemen SDM	Kegiatan	3	-	
		Cibinong Raya	Jumlah Kebutuhan/Formasi JF yang tersusun sesuai pedoman perhitungan kebutuhan JF	Jenis JF	10	-		Cibinong Raya	Jumlah Kebutuhan/Formasi JF yang tersusun sesuai pedoman perhitungan kebutuhan JF	Jenis JF	10	-	

		Cibinong Raya	Jumlah Kebutuhan JF yang diusulkan penetapannya ke Kementerian PAN dan RB	Jenis JF	3	-		Cibinong Raya	Jumlah Kebutuhan JF yang diusulkan penetapannya ke Kementerian PAN dan RB	Jenis JF	3	-	
		Cibinong Raya	Jumlah dokumen laporan pengembangan sistem informasi jabatan yang terintegrasi	Dokumen	1	-		Cibinong Raya	Jumlah dokumen laporan pengembangan sistem informasi jabatan yang terintegrasi	Dokumen	1	-	
	Penataan Organisasi	Cibinong Raya	Persentase koordinasi, fasilitasi serta sosialisasi tata laksana	%	100	110,489,976	Penataan Organisasi	Cibinong Raya	Persentase koordinasi, fasilitasi serta sosialisasi tata laksana	%	100	189,503,500	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cibinong Raya	Jumlah kebijakan berupa Kepbup dan SE terkait pengaturan tata laksana secara efektif dan efisien.	Dokumen	5	-	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cibinong Raya	Jumlah kebijakan berupa Kepbup dan SE terkait pengaturan tata laksana secara efektif dan efisien.	Dokumen	5	-	
		Cibinong Raya	Rancangan Kepbup Peta Bisnis Proses sesuai RPJMD Kabupaten Bogor 2025-2029	Dokumen	1	-		Cibinong Raya	Rancangan Kepbup Peta Bisnis Proses sesuai RPJMD Kabupaten Bogor 2025-2029	Dokumen	1	-	

		Cibinong Raya	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Tata Laksana (gabung dengan Yanlik)	Dokumen	1	-		Cibinong Raya	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Tata Laksana	Dokumen	1	-	
		Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	3	110,489,976		Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	3	189,503,500	
		Cibinong Raya	Jumlah SOP yang difasilitasi penyusunannya	Jenis SOP	5	-		Cibinong Raya	Jumlah SOP yang difasilitasi penyusunannya	Jenis SOP	5	-	
		Cibinong Raya	Jumlah SOP PD yang dievaluasi	PD	76	-		Cibinong Raya	Jumlah SOP PD yang dievaluasi	PD	76	-	
		Cibinong Raya	Rumusan Kebijakan Fleksibilitas Kerja	Dokumen	1	-		Cibinong Raya	Rumusan Kebijakan Fleksibilitas Kerja	Dokumen	1	-	

	Penataan Organisasi	Cibinong Raya	Tingkat Capaian RB Perangkat Daerah minimal Baik	%	28	121,547,271	Penataan Organisasi	Cibinong Raya	Tingkat Capaian RB Perangkat Daerah minimal Baik	%	28	207,871,600	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Jumlah Kepbup Renaksi RB)	Dokumen	2	121,547,271	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Jumlah Kepbup Renaksi RB)	Dokumen	2	207,871,600	
		Cibinong Raya	Jumlah Capaian Monev Implementasi Renaksi RB yang terkoordinasi dan terinput dalam Portal RB Menpan	Kegiatan	4	-		Cibinong Raya	Jumlah Capaian Monev Implementasi Renaksi RB yang terkoordinasi dan terinput dalam Portal RB Menpan	Kegiatan	4	-	
		Cibinong Raya	Jumlah pelaksanaan Roadshow RB	Perangkat Daerah	12	-		Cibinong Raya	Jumlah pelaksanaan Roadshow RB	Perangkat Daerah	8	-	
		Cibinong Raya	Jumlah Sosialisasi/FGD Mindset Reform Level Pimpinan JPT dan Administrator	Kegiatan	2	-		Cibinong Raya	Jumlah Sosialisasi/FGD Mindset Reform Level Pimpinan JPT dan Administrator	Kegiatan	2	-	

		Cibinong Raya	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi tema keorganisasian melalui "Warung Nasi"	Kegiatan	4	-		Cibinong Raya	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi tema keorganisasian melalui "Warung Nasi"	Kegiatan	8	-	
		Cibinong Raya	Jumlah Sosialisasi/Fasilitasi PD dan Evaluasi dalam penilaian RB PD (sosialisasi ke PD 1, pleno kab 2, pleno prop 2)	Kegiatan	5	-		Cibinong Raya	Jumlah Sosialisasi/Fasilitasi PD dan Evaluasi dalam penilaian RB PD (sosialisasi ke PD 1, pleno kab 2, pleno prop 2)	Kegiatan	5	-	
		Cibinong Raya	Dokumen Laporan Sementara dan Keputusan Final Hasil evaluasi RB PD	Dokumen	2	-		Cibinong Raya	Dokumen Laporan Sementara dan Keputusan Final Hasil evaluasi RB PD	Dokumen	2	-	
		Cibinong Raya				-		Cibinong Raya				-	
Penataan Organisasi		Cibinong Raya	Tingkat Capaian RB Perangkat Daerah minimal Baik	%	28	131,448,531	Penataan Organisasi	Cibinong Raya	Tingkat Capaian RB Perangkat Daerah minimal Baik	%	28	213,171,725	

Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (PEKPP, KPP dan IKM semester 1 dan 2/tahunan))	Dokumen	4	131,448,531	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (PEKPP, KPP dan IKM semester 1 dan 2/tahunan))	Dokumen	4	213,171,725	
	Cibinong Raya	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis ZI bagi TPI dan PD Target	Kegiatan	2	-		Cibinong Raya	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis ZI bagi TPI dan PD Target	Kegiatan	2	-	
	Cibinong Raya	Jumlah dokumen laporan pembangunan Zona Integritas	Dokumen	1	-		Cibinong Raya	Jumlah dokumen laporan pembangunan Zona Integritas	Dokumen	1	-	
	Cibinong Raya	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Yanlik (gabung dengan Tata Laksana)	Kegiatan	1	-		Cibinong Raya	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Yanlik (gabung dengan Tata Laksana)	Kegiatan	1	-	
Penataan Organisasi	Cibinong Raya	Persentase dokumen peningkatan Kinerja dan implementasi RB yang terselenggara	%	100	217,423,114	Penataan Organisasi	Cibinong Raya	Persentase dokumen peningkatan Kinerja dan implementasi RB yang terselenggara	%	100	296,437,693	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Camat	Dokumen	146	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Camat	Dokumen	146	-	
		Cibinong Raya	Jumlah Dokumen IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah	Dokumen	73	-		Cibinong Raya	Jumlah Dokumen IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah	Dokumen	73	-	
		Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	217,423,114		Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	296,437,693	
		Cibinong Raya	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi/Bintek Akuntabilitas Kinerja kepada PD	Kegiatan	2	-		Cibinong Raya	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi/Bintek Akuntabilitas Kinerja kepada PD	Kegiatan	2	-	
		Cibinong Raya	Jumlah pedoman penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	Dokumen	1	-		Cibinong Raya	Jumlah pedoman penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	Dokumen	1	-	

		Cibinong Raya	Dokumen laporan pengembangan aplikasi e SAKIP sesuai kebutuhan	Dokumen	1	-		Cibinong Raya	Dokumen laporan pengembangan aplikasi e SAKIP sesuai kebutuhan	Dokumen	1	-	
		Cibinong Raya	Jumlah pemenuhan data e SAKIP Terintegrasi (perencanaan, persiapan penilaian dan perubahan)	Kegiatan	2	-		Cibinong Raya	Jumlah pemenuhan data e SAKIP Terintegrasi (perencanaan, persiapan penilaian dan perubahan)	Kegiatan	2	-	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cibinong Raya	Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Terpenuhi	%	100	8,213,283,042	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cibinong Raya	Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Terpenuhi	%	100	6,858,228,225	
	Fasilitasi Keprotokolan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	1	5,786,446,163	Fasilitasi Keprotokolan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	1	5,602,255,000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	607,202,795	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	282,573,225	

	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	1,819,634,084	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	973,400,000	
		Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Akun Media Sosial dan Media Online	Laporan	12	-		Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Akun Media Sosial dan Media Online	Laporan	12	-	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cibinong Raya	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	AA	35,828,988,148	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cibinong Raya	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	AA	34,226,860,629	
		Cibinong Raya	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100			Cibinong Raya	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100		
		Cibinong Raya	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100			Cibinong Raya	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100		

	Administrasi Tata Pemerintahan	Cibinong Raya	Rata-rata Penerapan SPM Kabupaten Bogor	%	98,50	303,899,059	Administrasi Tata Pemerintahan	Cibinong Raya	Rata-rata Penerapan SPM Kabupaten Bogor	%	98,50	284,925,593	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Cibinong Raya	Jumlah Fasilitas dan Pendampingan Penerapan SPM Kabupaten Bogor	Pendampingan	5	303,899,059	Penataan Administrasi Pemerintahan	Cibinong Raya	Jumlah Fasilitas dan Pendampingan Penerapan SPM Kabupaten Bogor	Pendampingan	5	284,925,593	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Tata Pemerintahan	%	100	808,018,182	Administrasi Tata Pemerintahan	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Tata Pemerintahan	%	100	757,570,394	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	5	-	Penataan Administrasi Pemerintahan	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	5	-	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Bantuan Infrastruktur Kelurahan	Dokumen	12	451,237,927	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Bantuan Infrastruktur Kelurahan	Dokumen	12	423,065,351	

		Cibinong Raya	Jumlah Kunjungan Kepala Daerah ke Kecamatan	Kunjungan	30	-		Cibinong Raya	Jumlah Kunjungan Kepala Daerah ke Kecamatan	Kunjungan	30	-	
		Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	-		Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3	356,780,255	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3	334,505,043	
		Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Kapasitas Daerah	Dokumen	1	-		Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Kapasitas Daerah	Dokumen	1	-	
		Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Dokumen	1	-		Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Dokumen	1	-	

	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Rakyat	%	100	32,400,873,516	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Rakyat	%	100	31,177,978,474	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	5	10,659,302,146	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	5	9,854,274,050	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen	4	17,841,914,805	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen	4	16,867,516,479	
	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	5	3,899,656,564	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	5	4,456,187,945	
		Cibinong Raya	Jumlah Pengkoordinasian Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	4	-		Cibinong Raya	Jumlah Pengkoordinasian Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	4	-	

		Cibinong Raya	Jumlah Kegiatan Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	3	-		Cibinong Raya	Jumlah Kegiatan Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	3	-	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hibah Keagamaan	%	100	-	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hibah Keagamaan	%	100	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cibinong Raya	Laporan Penyelenggaraan Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan	Laporan	160	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cibinong Raya	Laporan Penyelenggaraan Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan	Laporan	160	-	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Cibinong Raya	Laporan Penyelenggaraan Hibah Lembaga Keagamaan	Laporan	8	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Cibinong Raya	Laporan Penyelenggaraan Hibah Lembaga Keagamaan	Laporan	8	-	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan sesuai Program Pembentukan Peraturan Bupati Peraturan Daerah	%	100	1,322,707,431	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan sesuai Program Pembentukan Peraturan Bupati Peraturan Daerah	%	100	1,240,125,543	

	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	395	873,687,426	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	395	819,140,200	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Cibinong Raya	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	395	449,020,005	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Cibinong Raya	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	395	420,985,343	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Tingkat Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi	Poin	>22.5	-	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Tingkat Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi	Poin	>22.5	-	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Di Harmonisasi	Dokumen	15	-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Di Harmonisasi	Dokumen	15	-	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat yang Berkualitas	Poin	>22.5	-	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat yang Berkualitas	Poin	>22.5	-	

	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Asn Yang Mendapat Peningkatan Kompetensi Dibidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Asn Yang Mendapat Peningkatan Kompetensi Dibidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	-	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Hasil Reviu	Poin	>27	-	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Hasil Reviu	Poin	>27	-	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Laporan pelaksanaan di Reregulasi dan Deregulasi Sebagai Tindak Lanjut dari Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Dokumen	2	-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Cibinong Raya	Jumlah Laporan pelaksanaan di Reregulasi dan Deregulasi Sebagai Tindak Lanjut dari Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Dokumen	2	-	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	Poin	>18	-	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	Poin	>18	-	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Jdih Terintegrasi Sesuai Dengan Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum	Dokumen	1	-	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Jdih Terintegrasi Sesuai Dengan Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum	Dokumen	1	-	

	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Persentase Perkara yang Ditangani	%	100	678,541,673	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Persentase Perkara yang Ditangani	%	100	489,498,350	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Cibinong Raya	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	35	678,541,673	Fasilitasi Bantuan Hukum	Cibinong Raya	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	35	489,498,350	
		Cibinong Raya	Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu	Penyuluhan	20	-		Cibinong Raya	Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu	Penyuluhan	20	-	
		Cibinong Raya	Jumlah Penyuluhan Hukum Aparatur	Penyuluhan	1	-		Cibinong Raya	Jumlah Penyuluhan Hukum Aparatur	Penyuluhan	1	-	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Persentase Ketercapaian Target Rencana Aksi Nasional HAM	%	100	-	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cibinong Raya	Persentase Ketercapaian Target Rencana Aksi Nasional HAM	%	100	-	

	Fasilitasi Bantuan Hukum	Cibinong Raya	Penyampaian Bukti Dukung Pemenuhan Rencana Aksi	Bukti Dukung	3	-	Fasilitasi Bantuan Hukum	Cibinong Raya	Penyampaian Bukti Dukung Pemenuhan Rencana Aksi	Bukti Dukung	3	-	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Cibinong Raya	Persentase Implementasi Kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang disepakati	%	80	314,948,288	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Cibinong Raya	Persentase Implementasi Kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang disepakati	%	80	276,762,275	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	110	187,657,305	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	110	164,904,825	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	12	72,296,483	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	12	48,326,325	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	54,994,500	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	63,531,125	

3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cibinong Raya	Indek Tata Kelola Pengadaan	Poin	80	9,975,438,010	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cibinong Raya	Indek Tata Kelola Pengadaan	Poin	80	10,830,461,062	
		Cibinong Raya	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100			Cibinong Raya	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100		
		Cibinong Raya	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100			Cibinong Raya	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cibinong Raya	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang perekonomian	%	100	1,813,517,865	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cibinong Raya	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang perekonomian	%	100	1,671,788,993	
	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	1,813,517,865	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	1,671,788,993	

	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan Terhadap Pembinaan BUMD	%	100	173,051,597	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan Terhadap Pembinaan BUMD	%	100	384,019,225	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	173,051,597	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	384,019,225	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup perekonomian	%	100	144,114,736	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup perekonomian	%	100	257,503,243	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan	1	144,114,736	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan	1	257,503,243	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cibinong Raya	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup administrasi pembangunan	%	100	2,734,587,405	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cibinong Raya	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup administrasi pembangunan	%	100	2,968,976,716	

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	3	1,395,992,267	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	3	1,515,646,955	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	487,996,750	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	529,824,243	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	850,598,387	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	923,505,518	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cibinong Raya	Persentase data perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu dan akurat	%	100	-	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cibinong Raya	Persentase data perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu dan akurat	%	100	-	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Data Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kegiatan	Laporan	12	-	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Cibinong Raya	Jumlah Laporan Data Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kegiatan	Laporan	12	-	

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	4,613,486,949	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	5,008,922,156	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	807,388,020	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	876,591,370	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4	1,010,510,512	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4	1,097,124,076	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	110	2,795,588,417	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	110	3,035,206,710	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	40	-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	40	-	

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Variabel Penilaian Tingkat Kematangan UKPBJ yang terpenuhi	Variabel	9	-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Variabel Penilaian Tingkat Kematangan UKPBJ yang terpenuhi	Variabel	9	-	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Persentase Penggunaan PDN Dalam PBJ	%	87	-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Persentase Penggunaan PDN Dalam PBJ	%	87	-	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Jumlah Sosialisasi aturan Pengaturan PDN	Surat Edaran	2	-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Jumlah Sosialisasi aturan Pengaturan PDN	Surat Edaran	2	-	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Sirup	Nilai	8	-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Sirup	Nilai	8	-	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan	%	82	-	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan	%	82	-	

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Tendering	Nilai	5	-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Tendering	Nilai	5	-	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Tender	%	93	-	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Tender	%	93	-	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Katalog	Nilai	2	-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Katalog	Nilai	2	-	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Persentase Terselesainya Pengadaan secara e-Katalog	%	30	-	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Persentase Terselesainya Pengadaan secara e-Katalog	%	30	-	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Toko Daring	Nilai	1	-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Toko Daring	Nilai	1	-	

	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan pada Toko Daring	Paket	1	-	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan pada Toko Daring	Paket	1	-	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Non E-Tendering/Non E-Purchasing	Nilai	3	-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Non E-Tendering/Non E-Purchasing	Nilai	3	-	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Non e-Tender dan Non e-Purchasing di banding RUP	%	58	-	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Non e-Tender dan Non e-Purchasing di banding RUP	%	58	-	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Kontrak	Nilai	4	-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Kontrak	Nilai	4	-	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Persentase Kontrak yang Terupload pada Sistem	%	81	-	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cibinong Raya	Persentase Kontrak yang Terupload pada Sistem	%	81	-	

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Kualifikasi Dan Kompetensi SDM PBJ	Nilai	22	-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Kualifikasi Dan Kompetensi SDM PBJ	Nilai	22	-	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Jumlah SDM PBJ yang terqualifikasi dan berkompetensi	Orang	54	-	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Cibinong Raya	Jumlah SDM PBJ yang terqualifikasi dan berkompetensi	Orang	54	-	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Sumber Daya Alam	%	100	496,679,458	Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi, Rumusan Kebijakan serta Pemantauan Sumber Daya Alam	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Sumber Daya Alam	%	100	539,250,729	
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	333,000,879	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	361,543,236	

	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	99,255,127	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	107,762,368	
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	64,423,453	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Cibinong Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	69,945,125	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penjangkaran aspirasi melalui sistem SIPD, usulan Musrenbang, Hibah dan Pokir DPRD dalam rangka penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026, dapat disampaikan bahwa pada Sekretariat Daerah usulan yang masuk merupakan usulan aspirasi terkait hibah sarana dan prasarana keagamaan dan hibah Lembaga keagamaan yang masuk ke dalam Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.

Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat pada Sekretariat Daerah diperoleh melalui input usulan aspirasi di aplikasi SIPD-RI pada bulan Maret 2024. Dari usulan yang masuk penerima hibah yaitu sebanyak 8 (Delapan) lembaga keagamaan dan 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) usulan hibah sarana dan prasarana keagamaan, dengan rincian diantara yaitu :

1. Hibah sarana dan prasarana pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental sebesar Rp5.000.000.000,- dengan rincian Masjid dan Mushola sejumlah 33 unit dengan anggaran sebesar Rp903.000.000,- dan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim sejumlah 146, dengan anggaran sebesar Rp.4.097.000.000,-;
2. Hibah Lembaga keagamaan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial sebesar Rp.16.856.482.416,-.

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam pelaksanaan Hibah tersebut terdapat pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Pelaksanaan Kebijakan Rakyat, Kegiatan Kesejahteraan dan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial. Disajikan dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	SEKRETARIAT DAERAH					
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cibinong Raya	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	AA	
		Cibinong Raya	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	
		Cibinong Raya	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran Rakyat	Cibinong Raya	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hibah Keagamaan	%	100	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cibinong Raya	Laporan Penyelenggaraan Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan	Laporan	160	1 Masjid dan Mushola sejumlah 33 unit dengan anggaran sebesar Rp903.000.000,- 2 Pondok Pesantren dan Majelis Taklim sejumlah 146, dengan anggaran sebesar Rp.4.097.000.000,-
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Cibinong Raya	Laporan Penyelenggaraan Hibah Lembaga Keagamaan	Laporan	8	1 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bogor 2 Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Bogor 3 Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bogor 4 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor 5 PD. Mathla'ul Anwar Kabupaten Bogor 6 PD. Muhammadiyah Kabupaten Bogor 7 Pc. Syarikat Islam Kabupaten Bogor 8 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Bogor

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi secara nasional, penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan, program, dan kegiatan daerah senantiasa sejalan dan selaras dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menetapkan Delapan Agenda Pokok Prioritas Pembangunan Nasional. Salah satu agenda pokok tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Khusus Agenda ini tentang penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, secara langsung berhubungan dengan tugas utama Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta terkoordinasi. Agenda ini juga mempertegas pentingnya peran Sekretariat Daerah dalam penguatan sistem administrasi pemerintahan, perumusan kebijakan daerah yang berpihak pada pelayanan publik, serta pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah untuk menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu, Keterkaitan dengan Kebijakan Provinsi Jawa Barat Di tingkat provinsi, kebijakan pembangunan dirumuskan melalui dokumen perencanaan strategis seperti RPJPD Jawa Barat 2025–2045, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta arahan spasial dan sektoral dalam RTRW Provinsi Jawa Barat. Beberapa isu strategis yang disoroti oleh Provinsi Jawa Barat dan relevan dengan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor antara lain:

- a. Permasalahan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan lintas kabupaten/kota;
- b. Dinamika kebijakan nasional dan global yang berdampak pada tatanan birokrasi daerah;

- c. Kebutuhan harmonisasi regulasi dan sinkronisasi program pembangunan antardaerah; dan
- d. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam perumusan kebijakan berbasis data dan evaluasi kinerja.

Dalam konteks ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor harus mampu berperan aktif sebagai simpul koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, serta sebagai penggerak reformasi birokrasi yang terarah dan berdampak langsung terhadap capaian pembangunan daerah. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 secara substansial harus mempertimbangkan:

- a. Keselarasan dengan Agenda Nasional dan Inpres Tahun 2025, terutama dalam penguatan birokrasi, efisiensi belanja, dan koordinasi lintas perangkat daerah.
- b. Sinkronisasi dengan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Barat, termasuk dinamika kebijakan spasial, perencanaan regional, dan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah.

Kesesuaian ini diharapkan mampu memperkuat posisi Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, adaptif, dan akuntabel. Sebagai bentuk konkret, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor melaksanakan sejumlah program dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Urusan / Unsur : Penunjang
Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	
SEKRETARIAT DAERAH							
1	Melakukan Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	BB	Predikat	374,520,352,619
			Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	11,90	Poin	

			Tercapainya Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	Tingkat Implementasi Sistem Kerja	100	%	
			Tercapainya Kematangan Kelembagaan menuju Fleskibilitas Kerja	Tingkat Kematangan Kelembagaan	Tinggi	Predikat	
			Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Administrasi Umum	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Administrasi Umum	100	%	
				Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Administrasi Umum	100	%	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tercapainya Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	AA	Predikat	33,426,862,460
			Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	
				Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Tercapainya Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80	Poin	10,830,462,597
			Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	100	%	
				Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	100	%	

Tabel 3.2
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat

Tahun 2026

Urusan / Unsur : Penunjang
Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
SEKRETARIAT DAERAH							
1	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi Yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan Sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	BB	Predikat	374,520,352,619
			Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	11,90	Poin	
			Tercapainya Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	Tingkat Implementasi Sistem Kerja	100	%	
			Tercapainya Kematangan Kelembagaan menuju Fleksibilitas Kerja	Tingkat Kematangan Kelembagaan	Tinggi	Predikat	
			Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Administrasi Umum	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Administrasi Umum	100	%	
				Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Administrasi Umum	100	%	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tercapainya Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	AA	Predikat	33,426,862,460
			Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	
				Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Tercapainya Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80	Poin	10,830,462,597
			Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	100	%	
				Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	100	%	

Untuk memastikan konsistensi antara kebijakan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor juga mengacu pada Instruksi Presiden Tahun 2025, yang terdiri dari delapan arahan strategis sebagai berikut

Tabel 3.3
Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

Urusan / Unsur : Penunjang
Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD	Sekretariat Daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam mengkoordinasikan efisiensi belanja lintas perangkat daerah serta memastikan alokasi anggaran selaras dengan prioritas daerah.	Sekretariat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 bertujuan sebagai pedoman dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Dokumen ini juga menjadi acuan operasional tahunan guna menjamin keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah “Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Akuntabel” Tujuan ini mencerminkan peran strategis Sekretariat Daerah sebagai penggerak utama koordinasi lintas perangkat daerah, fasilitator kebijakan, serta penguat sistem akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran kinerja sebagai berikut “Tercapainya target pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.” Sasaran ini menitikberatkan pada optimalisasi fungsi koordinatif dan fasilitatif Sekretariat Daerah dalam memastikan seluruh

perangkat daerah dapat melaksanakan tugasnya secara terukur, efisien, dan sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, Penataan dan evaluasi organisasi PD dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan Pengoordinasian penyiapan administrasian, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB). Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2026, diukur dengan menggunakan indikator Tujuan dan indikator Sasaran Tahun 2026 yang dapat terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Urusan / Unsur : Penunjang
Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
Tujuan PD					
Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Akuntabel	Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Akuntabel	Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik	Jumlah PD dengan Ketercapaian IKU Minimal Baik ----- x 100% : Total PD	100	%
Sasaran PD					
Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda	Jumlah Ketercapaian RB General Kewenangan Setda ----- x 100% : RB General Kewenangan Setda	100	%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Utama
- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

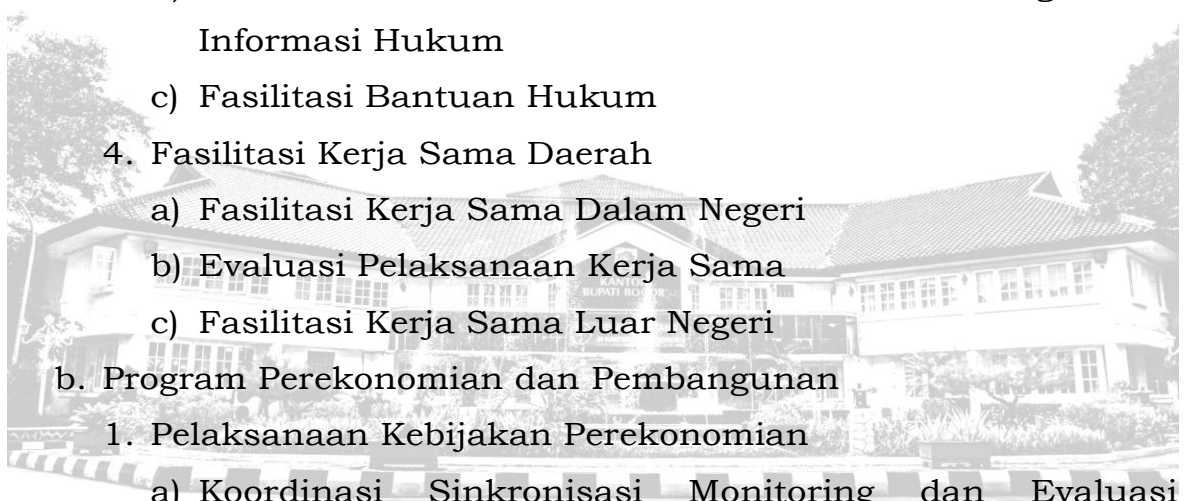
1. Administrasi Tata Pemerintahan

a) Penataan Administrasi Pemerintahan

b) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

c) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- 
- a) Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - b) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
 - c) Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - 3. Fasilitas dan Koordinasi Hukum
 - a) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - b) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
 - c) Fasilitas Bantuan Hukum
 - 4. Fasilitas Kerja Sama Daerah
 - a) Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri
 - b) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
 - c) Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri
 - b. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - 1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - a) Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - b) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - c) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
 - 2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - a) Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
 - b) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - c) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
 - 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - c) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 4. Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi, Rumusan Kebijakan serta Pemantauan Sumber Daya Alam
 - a) Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan
 - b) Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

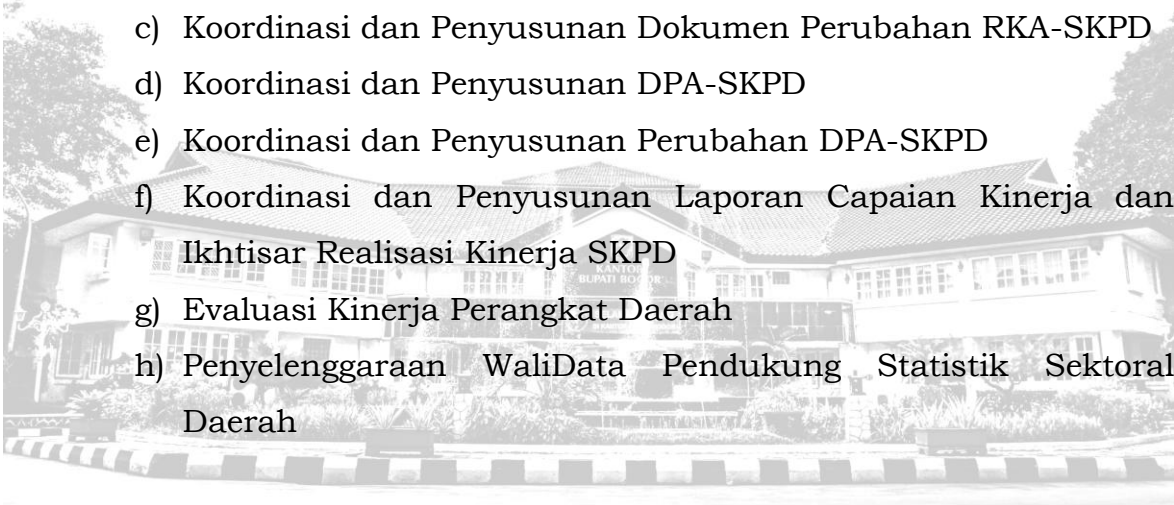
- c) Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

2. Program Pendukung

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- h) Penyelenggaraan WaliData Pendukung Statistik Sektorial Daerah



2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- f) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

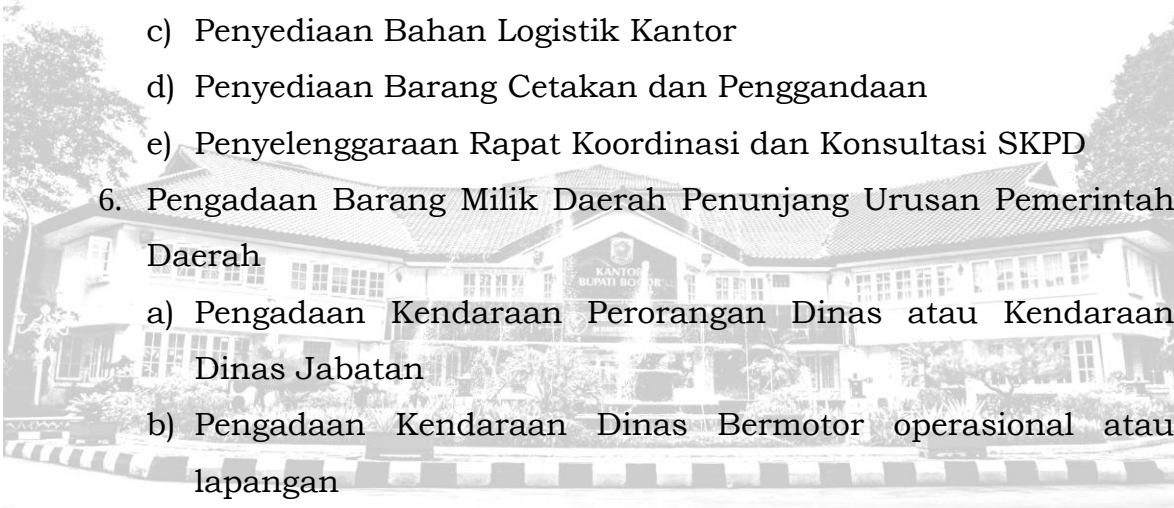
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

- b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor operasional atau lapangan
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Mebel
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - c) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - d) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - a) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - b) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - c) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
11. Penataan Organisasi
 - a) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b) Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - c) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - d) Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a) Fasilitas Keprotokolan
 - b) Fasilitas Komunikasi Pimpinan
 - c) Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026, secara rinci menggambarkan jenis program yang akan dilaksanakan, kegiatan yang menjadi turunan dari program tersebut, serta sub kegiatan yang bersifat operasional dan mendetail. Penyusunan ini sebagai panduan pelaksanaan, alat koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Daerah sepanjang tahun anggaran. Perlu dicatat bahwa dalam perencanaan Tahun 2026, terdapat satu kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab lebih dari satu Bagian dan lebih dari satu tim. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi lintas bagian untuk mendukung pelaksanaan, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Seluruh informasi tersebut dirangkum secara sistematis dalam Tabel 3.5, yang memuat rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Urusan / Unsur : Penunjang
 Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
 Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT DAERAH	3	15	67	180,947,375,968
Asisten Administrasi Umum	1	11	55	136,690,050,911
Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	3	16	70,677,003,305
Tim Perencanaan	1	1	6	849,260,263
Tim Pelaporan	1	1	5	523,646,986
Tim Keuangan	1	1	5	69,304,096,056
Bagian Umum	1	6	30	57,189,264,771
Sub Bagian Perlengkapan	1	4	17	34,791,507,606
Sub Bagian Rumah Tangga	1	1	5	10,557,560,753
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian	1	1	8	11,840,196,412
Bagian Organisasi	1	1	5	1,331,985,409
Tim Kelembagaan dan Tim Analisis Jabatan	1	1	1	425,000,000
Tim Tata Laksana	1	1	1	189,503,650
Tim Pelayanan Publik	1	1	1	213,172,075
Tim Reformasi Birokrasi	1	1	1	207,871,975
Tim Akuntabilitas Kinerja	1	1	1	296,437,709
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	1	4	7,491,797,426
Sub Bagian Protokol	1	1	2	5,718,527,978
Tim Komunikasi Pimpinan	1	1	1	282,718,966
Tim Dokumentasian Pimpinan	1	1	1	1,490,550,482
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	4	12	33,426,862,460
Bagian Tata Pemerintahan	1	1	3	1,042,496,528
Tim Penataan Administrasi Pemerintahan	1	1	1	284,925,628
Tim Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	1	1	423,065,631
Tim Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	1	1	334,505,269
Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	3	30,377,978,474
Tim Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	1	1	9,993,806,216
Tim Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1	1	1	16,727,984,313
Tim Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1	1	1	3,656,187,945
Bagian Perundang-Undangan	1	1	2	1,240,126,376
Tim Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan Tim Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	1	1	1	819,140,194
Tim Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1	1	1	420,986,182
Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum	1	1	4	766,261,082

Tim Bantuan Hukum Litigasi dan Tim Bantuan Hukum Non Litigasi	1	1	1	489,498,496
Tim Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1	1	3	276,762,586
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1			10,830,462,597
Bagian Perekonomian	1	1	3	2,313,311,504
Tim Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	1	1	1,968,959,898
Tim Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	1	1	187,884,366
Tim Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1	1	1	156,467,240
Bagian Administrasi Pembangunan	1	1	3	2,968,977,062
Tim Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1	1	1	1,515,646,938
Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	1	1	529,824,409
Tim Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	1	1	923,505,715
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	3	5,008,922,694
Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	876,591,659
Tim Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	1	1	1,097,124,386
Tim Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	3,035,206,649
Bagian Sumber Daya Alam	1	1	3	539,251,337
Tim Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	1	1	1	361,543,378
Tim Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	1	1	107,762,580
Tim Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	1	1	69,945,379

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Rencana Kerja merupakan penjabaran operasional dari sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dalam konteks Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, perencanaan tahunan ini menjadi pedoman utama dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pemerintahan daerah, serta tugas kepala daerah.

Sebagai bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran, penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025–2030, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar rencana kegiatan yang disusun bersifat realistis, adaptif terhadap tantangan, dan responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Perencanaan kinerja tahunan juga memerlukan keselarasan dan integrasi antara program yang dirancang pada tingkat manajerial dengan kegiatan-kegiatan operasional di tingkat pelaksana. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen ini telah disusun berdasarkan pendekatan teknokratik dan partisipatif, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan riil organisasi, ketersediaan sumber daya, dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026, disusun secara rinci untuk menggambarkan keterkaitan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Informasi ini ditampilkan secara sistematis dalam Tabel 4.1, yang memuat rincian program prioritas, volume kegiatan, target capaian, serta kebutuhan anggaran yang akan digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Urusan / Unsur : Penunjang
Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SEKRETARIAT DAERAH				419,577,674,310				215,581,166,677
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Predikat	BB	374,520,352,619	Cibinong Raya	APBD	BB	166,805,757,741
		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Poin	11,90		Cibinong Raya	APBD	11,92	
		Tingkat Implementasi Sistem Kerja	%	100		Cibinong Raya	APBD	100	
		Tingkat Kematangan Kelembagaan	Predikat	Tinggi		Cibinong Raya	APBD	Tinggi	
		Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Administrasi Umum	%	100		Cibinong Raya	APBD	100	
		Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Administrasi Umum	%	100		Cibinong Raya	APBD	100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100	1,292,399,286	Cibinong Raya	APBD	100	566,954,411
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	618,105,618	Cibinong Raya	APBD	6.00	259,652,536.94
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	125,749,975	Cibinong Raya	APBD	1.00	65,622,709.97
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	59,999,850	Cibinong Raya	APBD	1.00	24,552,802.77
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	1	45,754,475	Cibinong Raya	APBD	1.00	38,691,995.62

		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	34,221,500	Cibinong Raya	APBD	1.00	27,380,065.99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	106,817,868	Cibinong Raya	APBD	3.00	94,782,055.03
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	262,150,000	Cibinong Raya	APBD	4.00	45,567,368.90
	Penyelenggaraa n WaliData Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	39,600,000.00	Cibinong Raya	APBD	1.00	10,704,876.14
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Sekretariat Daerah	%	100	58,421,273,856	Cibinong Raya	APBD	100	63,867,711,841
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	224	57,794,245,484	Cibinong Raya	APBD	224.00	63,337,452,872.11
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	343,209,918	Cibinong Raya	APBD	2.00	275,248,372.73
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	56,798,518	Cibinong Raya	APBD	2.00	40,564,680.44
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	75,721,486	Cibinong Raya	APBD	1.00	72,219,987.71
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	16	128,209,075	Cibinong Raya	APBD	16.00	115,265,980.19
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	23,089,375	Cibinong Raya	APBD	2.00	26,959,947.82
	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase barang milik daerah yang	%	100	13,781,427	Cibinong Raya	APBD	100	16,414,468

	Perangkat Daerah	terpelihara dengan baik							
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Sekretariat Daerah	Dokumen	1	890,331	Cibinong Raya	APBD	1.00	1,060,999.20
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Laporan	1	1,705,848	Cibinong Raya	APBD	1.00	2,033,439.88
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	11,185,248	Cibinong Raya	APBD	1.00	13,320,028.73
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	2,991,183,915	Cibinong Raya	APBD	100	3,035,053,406
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	722,106,204.00	Cibinong Raya	APBD	12.00	860,038,226.17
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	160,881,391.00	Cibinong Raya	APBD	6.00	212,592,200.00
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	258,196,320.00	Cibinong Raya	APBD	1.00	307,594,665.07
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Asesment Pegawai Lingkup Sekretariat Daerah	Laporan	1	-	Cibinong Raya	APBD	1.00	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	1,850,000,000.00	Cibinong Raya	APBD	30.00	1,654,828,314.41
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	100	25,673,337,468	Cibinong Raya	APBD	100	39,057,967,930
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	419,413,920.00	Cibinong Raya	APBD	6.00	499,452,883.35
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	15,211,987,769.00	Cibinong Raya	APBD	15.00	18,467,280,000.59
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	3,151,242,975.00	Cibinong Raya	APBD	4.00	3,752,563,974.96
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	195,389,925.00	Cibinong Raya	APBD	45.00	232,674,558.66
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Bulanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	6,499,999,720.00	Cibinong Raya	APBD	12.00	15,787,108,212.47
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Digitalisasi Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	195,303,159	Cibinong Raya	APBD	1.00	318,888,300.00

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	2,560,400,000	Cibinong Raya	APBD	100	2,710,550,550
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2,560,400,000.00	Cibinong Raya	APBD	12.00	2,710,550,550.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan dengan baik	%	100	1,977,022,000	Cibinong Raya	APBD	100	2,303,134,496
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	1,577,022,000.00	Cibinong Raya	APBD	3.00	1,877,950,096.07
	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Bermotor operasional atau lapangan yang Disediakan	Unit	1	400,000,000.00	Cibinong Raya	APBD	1	425,184,400.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	12,221,775,197	Cibinong Raya	APBD	100	14,235,154,311
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1,606,592,526	Cibinong Raya	APBD	2.00	2,019,625,900.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Layanan Internet, Layanan Selular, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4,459,625,344	Cibinong Raya	APBD	4.00	4,885,290,966.53
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,326,690,715	Cibinong Raya	APBD	1.00	1,579,850,343.81
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4,828,866,612	Cibinong Raya	APBD	4.00	5,750,387,100.92
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100	247,895,175,467	Cibinong Raya	APBD	100	12,697,246,212
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	675,560,000	Cibinong Raya	APBD	6	782,361,182
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	256	1,143,750,000	Cibinong Raya	APBD	256	1,254,255,751

	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	55,217,700	Cibinong Raya	APBD	5	65,754,767
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	1	245,620,646,967	Cibinong Raya	APBD	1	9,276,841,101
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	1	200,000,000	Cibinong Raya	APBD	1	1,318,033,411
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	1	200,000,800	Cibinong Raya	APBD	1	212,592,200
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Medical Check Up Kepala Daerah yang Dilakukan	%	100	220,872,075	Cibinong Raya	APBD	100	263,019,070
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	220,872,075	Cibinong Raya	APBD	2	263,019,070
	Fasilitasi Kerumahtangga n Sekretariat Daerah	Persentase Layanan Kerumahtangga n Sekretariat Daerah yang Terpenuhi	%	100	3,188,640,450	Cibinong Raya	APBD	100	5,839,981,252
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	1,602,087,600	Cibinong Raya	APBD	12	2,604,666,136
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	12	724,384,200	Cibinong Raya	APBD	12	2,127,981,978
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	862,168,650	Cibinong Raya	APBD	12	1,107,333,139
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Gaji, Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu	%	100	9,320,901,960	Cibinong Raya	APBD	100	11,922,735,780
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	24	1,581,178,976	Cibinong Raya	APBD	24	1,732,834,265
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	24	7,739,722,984	Cibinong Raya	APBD	24	10,189,901,515
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	100	553,376,775	Cibinong Raya	APBD	100	658,972,361

	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	553,376,775	Cibinong Raya	APBD	100	658,972,361
	Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup organisasi	%	100	425,000,000	Cibinong Raya	APBD	100	282,978,601
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Jumlah Rumusan Kebijakan Kelembagaan berupa Kepbup/Perbup Kelembagaan)	Dokumen	20	425,000,000	Cibinong Raya	APBD	20	282,978,601
		Jumlah Dokumen Kajian dan Naskah Akademik Kelembagaan yang tersusun	Dokumen	2	-	Cibinong Raya	APBD	2	-
	Penataan Organisasi	Kategori Penerapan Sistem Kerja Berdasarkan SE Menpan No 15 Tahun 2023	Kategori	4,5	-	Cibinong Raya	APBD	5	-
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah rancangan Perbup/Kepbup/ SE Implementasi Sistem Kerja 2025	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1	-
		Laporan Hasil FGD/Sharing Session	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1	-
		Telaahan Staff sebagai bahan perumusan kebijakan Sistem Kerja Tahun 2026	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1	-
		Persentase kematangan kelembagaan PD pada level sangat tinggi	%	45	-	Cibinong Raya	APBD	55	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi dan asistensi/konseling kelembagaan	Perangkat Daerah	76	-	Cibinong Raya	APBD	76	-
		Laporan Hasil Evaluasi Kematangan Kelembagaan kepada PPK dan kepada Kemendagri	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1	-
		Persentase pelaksanaan koordinasi bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	%	100	-	Cibinong Raya	APBD	100	-
		Jumlah fasilitasi kepegawaian yang terpenuhi sesuai kebutuhan manajemen SDM	Kegiatan	3	-	Cibinong Raya	APBD	3	-
		Jumlah Kebutuhan/Formasi JF yang tersusun sesuai pedoman perhitungan kebutuhan JF	Jenis JF	10	-	Cibinong Raya	APBD	10	-

		Jumlah Kebutuhan JF yang diusulkan penetapannya ke Kementerian PAN dan RB	Jenis JF	3	-	Cibinong Raya	APBD	3	-
		Jumlah dokumen laporan pengembangan sistem informasi jabatan yang terintegrasi	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1	-
	Penataan Organisasi	Persentase koordinasi, fasilitasi serta sosialisasi tata laksana	%	100	189,503,500	Cibinong Raya	APBD	100	117,446,535
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah kebijakan berupa Keppup dan SE terkait pengaturan tata laksana secara efektif dan efisien.	Dokumen	5	-	Cibinong Raya	APBD	5.00	-
		Rancangan Keppup Peta Bisnis Proses sesuai RPJMD Kabupaten Bogor 2025-2029	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1.00	-
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi Tata Laksana (gabung dengan Yanlik)	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1.00	-
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	3	189,503,500	Cibinong Raya	APBD	3	117,446,535
		Jumlah SOP yang difasilitasi penyusunannya	Jenis SOP	5	-	Cibinong Raya	APBD	5.00	-
		Jumlah SOP PD yang dievaluasi	PD	76	-	Cibinong Raya	APBD	76.00	-
		Rumusan Kebijakan Fleksibilitas Kerja	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1.00	-
	Penataan Organisasi	Tingkat Capaian RB Perangkat Daerah minimal Baik	%	27.78	207,871,600	Cibinong Raya	APBD	47	129,200,008
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Jumlah Keppup Renaksi RB)	Dokumen	2	207,871,600	Cibinong Raya	APBD	2	129,200,008
		Jumah Capaian Monev Implementasi Renaksi RB yang terkoordinasi dan terinput dalam Portal RB Menpan	Kegiatan	4	-	Cibinong Raya	APBD	4.00	-
		Jumlah pelaksanaan Roadshow RB	Perangkat Daerah	8	-	Cibinong Raya	APBD	12.00	-
		Jumlah Sosialisasi/FGD Mindset Reform Level Pimpinan JPT dan Administrator	Kegiatan	2	-	Cibinong Raya	APBD	2.00	-
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi tema keorganisasian melalui "Warung Nasi"	Kegiatan	8	-	Cibinong Raya	APBD	4.00	-

		Jumlah Sosialisasi/Fasilitasi PD dan Evaluator dalam penilaian RB PD (sosialisasi ke PD 1, pleno kab 2, pleno prop 2)	Kegiatan	5	-	Cibinong Raya	APBD	5.00	-
		Dokumen Laporan Sementara dan Keputusan Final Hasil evaluasi RB PD	Dokumen	2	-	Cibinong Raya	APBD	2.00	-
					-	Cibinong Raya	APBD		-
	Penataan Organisasi	Tingkat Capaian RB Perangkat Daerah minimal Baik	%	27.78	213,171,725	Cibinong Raya	APBD	47	139,724,662
	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (PEKPP, KPP dan IKM semester 1 dan 2/tahunan))	Dokumen	4	213,171,725	Cibinong Raya	APBD	4	139,724,662
		Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis ZI bagi TPI dan PD Target	Kegiatan	2	-	Cibinong Raya	APBD	2.00	-
		Jumlah dokumen laporan pembangunan Zona Integritas	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1.00	-
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi Yanlik (gabung dengan Tata Laksana)	Kegiatan	1	-	Cibinong Raya	APBD	1.00	-
	Penataan Organisasi	Persentase dokumen peningkatan Kinerja dan implementasi RB yang terselenggara	%	100	296,437,693	Cibinong Raya	APBD	100	231,112,291
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Camat	Dokumen	146	-	Cibinong Raya	APBD	146.00	-
		Jumlah Dokumen IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah	Dokumen	73	-	Cibinong Raya	APBD	73.00	-
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	296,437,693	Cibinong Raya	APBD	1	231,112,291
		Jumlah pelaksanaan Sosialisasi/Bintek Akuntabilitas Kinerja kepada PD	Kegiatan	2	-	Cibinong Raya	APBD	2.00	-
		Jumlah pedoman penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1.00	-
		Dokumen laporan pengembangan aplikasi e SAKIP	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1.00	-

		sesuai kebutuhan							
		Jumlah pemenuhan data e SAKIP Terintegrasi (perencanaan, persiapan penilaian dan perubahan)	Kegiatan	2	-	Cibinong Raya	APBD	2.00	-
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Terpenuhi	%	100	6,858,228,225	Cibinong Raya	APBD	100	8,730,399,556
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	1	5,602,255,000	Cibinong Raya	APBD	1	6,150,766,600
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	282,573,225	Cibinong Raya	APBD	1	645,432,890
	Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Laporan	12	973,400,000	Cibinong Raya	APBD	12	1,934,200,066
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Akun Media Sosial dan Media Online	Laporan	12	-	Cibinong Raya	APBD	12.00	-
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	AA	34,226,860,629	Cibinong Raya	APBD	AA	38,171,907,373
		Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100		Cibinong Raya	APBD	100	
		Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100		Cibinong Raya	APBD	100	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rata-rata Penerapan SPM Kabupaten Bogor	%	98,50	284,925,593	Cibinong Raya	APBD	98,50	323,032,848
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Fasilitasi dan Pendampingan Penerapan SPM Kabupaten Bogor	Pendampi ngan	5	284,925,593	Cibinong Raya	APBD	5	323,032,848
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Tata Pemerintahan	%	100	757,570,394	Cibinong Raya	APBD	100	858,891,815
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	5	-	Cibinong Raya	APBD	5	-
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Bantuan Infrastruktur Kelurahan	Dokumen	12	423,065,351	Cibinong Raya	APBD	12	479,648,318
		Jumlah Kunjungan Kepala Daerah ke Kecamatan	Kunjungan	30	-	Cibinong Raya	APBD	30	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	-	Cibinong Raya	APBD	3	-

	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3	334,505,043	Cibinong Raya	APBD	3	379,243,497
		Jumlah Dokumen Hasil Kajian Kapasitas Daerah	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1	-
		Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah (LPPD)	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1	-
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Rakyat	%	100	31,177,978,474	Cibinong Raya	APBD	100	34,440,864,913
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	5	9,854,274,050	Cibinong Raya	APBD	5	11,330,422,469
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen	4	16,867,516,479	Cibinong Raya	APBD	6	18,965,259,603
	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	5	4,456,187,945	Cibinong Raya	APBD	5	4,145,182,841
		Jumlah Pengkoordinasia n Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	4	-	Cibinong Raya	APBD	4.00	-
		Jumlah Kegiatan Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	3	-	Cibinong Raya	APBD	3.00	-
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraa n Hibah Keagamaan	%	100	-	Cibinong Raya	APBD	100	-
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Laporan Penyelenggaraa n Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan	Laporan	160	-	Cibinong Raya	APBD	160.00	-
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Laporan Penyelenggaraa n Hibah Lembaga Keagamaan	Laporan	8	-	Cibinong Raya	APBD	7.00	-
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan sesuai Program Pembentukan Peraturan Bupati Peraturan Daerah	%	100	1,240,125,543	Cibinong Raya	APBD	100	1,405,986,414
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	395	819,140,200	Cibinong Raya	APBD	395	928,695,660
	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	395	420,985,343	Cibinong Raya	APBD	395	477,290,754
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tingkat Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi	Poin	>22.5	-	Cibinong Raya	APBD	>22.5	-

	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Di Harmonisasi	Dokumen	15	-	Cibinong Raya	APBD	15	-
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat yang Berkualitas	Poin	>22.5	-	Cibinong Raya	APBD	>22.5	-
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Asn Yang Mendapat Peningkatan Kompetensi Dibidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	-	Cibinong Raya	APBD	6	-
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Hasil Reviu	Poin	>27	-	Cibinong Raya	APBD	>27	-
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan di Reregulasi dan Deregulasi Sebagai Tindak Lanjut dari Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Dokumen	2	-	Cibinong Raya	APBD	2	-
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	Poin	>18	-	Cibinong Raya	APBD	>18	-
	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Pengelolaan Jdih Terintegrasi Sesuai Dengan Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum	Dokumen	1	-	Cibinong Raya	APBD	1	-
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Perkara yang Ditangani	%	100	489,498,350	Cibinong Raya	APBD	100	796,688,267
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	35	489,498,350	Cibinong Raya	APBD	35	796,688,267
		Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu	Penyuluhan	20	-	Cibinong Raya	APBD	20.00	-
		Jumlah Penyuluhan Hukum Aparatur	Penyuluhan	1	-	Cibinong Raya	APBD	1.00	-
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Ketercapaian Target Rencana Aksi Nasional HAM	%	100	-	Cibinong Raya	APBD	100	-
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Penyampaian Bukti Dukung Pemenuhan Rencana Aksi	Bukti Dukung	3	-	Cibinong Raya	APBD	3.00	-
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Implementasi Kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang disepakati	%	80	276,762,275	Cibinong Raya	APBD	80	346,443,116
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	110	164,904,825	Cibinong Raya	APBD	110	206,423,036
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	Laporan	12	48,326,325	Cibinong Raya	APBD	12	79,526,131

		Pelaksanaan Kerja Sama							
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	63,531,125	Cibinong Raya	APBD	1	60,493,950
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indek Tata Kelola Pengadaan	Poin	80	10,830,461,062	Cibinong Raya	APBD	81	10,603,501,563
		Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100		Cibinong Raya	APBD	100	
		Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100		Cibinong Raya	APBD	100	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang perekonomian	%	100	1,671,788,993	Cibinong Raya	APBD	100	1,927,698,764
	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	1,671,788,993	Cibinong Raya	APBD	1	1,927,698,764
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Terhadap Pembinaan BUMD	%	100	384,019,225	Cibinong Raya	APBD	100	183,947,099
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	384,019,225	Cibinong Raya	APBD	1	183,947,099
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup perekonomian	%	100	257,503,243	Cibinong Raya	APBD	100	153,188,344
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan	1	257,503,243	Cibinong Raya	APBD	1	153,188,344
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup administrasi pembangunan	%	100	2,968,976,716	Cibinong Raya	APBD	100	2,906,759,762
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	3	1,515,646,955	Cibinong Raya	APBD	3	1,483,885,336
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	2	529,824,243	Cibinong Raya	APBD	2	518,721,514
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	923,505,518	Cibinong Raya	APBD	3	904,152,912

	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase data perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu dan akurat	%	100	-	Cibinong Raya	APBD	100	-
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Data Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kegiatan	Laporan	12	-	Cibinong Raya	APBD	12	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	5,008,922,156	Cibinong Raya	APBD	100	4,903,956,701
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	876,591,370	Cibinong Raya	APBD	1	858,221,978
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4	1,097,124,076	Cibinong Raya	APBD	4	1,074,133,265
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	110	3,035,206,710	Cibinong Raya	APBD	110	2,971,601,459
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	40	-	Cibinong Raya	APBD	40	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Penilaian Tingkat Kematangan UKPBJ yang terpenuhi	Variabel	9	-	Cibinong Raya	APBD	9	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penggunaan PDN Dalam PBJ	%	87	-	Cibinong Raya	APBD	87	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sosialisasi aturan Pengaturan PDN	Surat Edaran	2	-	Cibinong Raya	APBD	2	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Sirup	Nilai	8.2	-	Cibinong Raya	APBD	8	-
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan	%	82	-	Cibinong Raya	APBD	82	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Tendering	Nilai	4.7	-	Cibinong Raya	APBD	5	-
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Tender	%	93	-	Cibinong Raya	APBD	93	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Katalog	Nilai	2	-	Cibinong Raya	APBD	2	-
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase terselesaikannya Pengadaan secara e-Katalog	%	30	-	Cibinong Raya	APBD	50	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Toko Daring	Nilai	1	-	Cibinong Raya	APBD	1	-

	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan pada Toko Daring	Paket	1	-	Cibinong Raya	APBD	1	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Non E-Tendering/Non E-Purchasing	Nilai	3	-	Cibinong Raya	APBD	3	-
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Non e-Tender dan Non e-Purchasing di banding RUP	%	58	-	Cibinong Raya	APBD	58	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Kontrak	Nilai	4.1	-	Cibinong Raya	APBD	4	-
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Kontrak yang Terupload pada Sistem	%	81	-	Cibinong Raya	APBD	81	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kualifikasi Dan Kompetensi SDM PBJ	Nilai	22.4	-	Cibinong Raya	APBD	23	-
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM PBJ yang terqualifikasi dan berkompetensi	Orang	54	-	Cibinong Raya	APBD	65	-
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Sumber Daya Alam	%	100	539,250,729	Cibinong Raya	APBD	100	527,950,893
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	361,543,236	Cibinong Raya	APBD	1	353,966,947
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	107,762,368	Cibinong Raya	APBD	1	105,504,329
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	69,945,125	Cibinong Raya	APBD	1	68,479,618

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan komponen krusial dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Perencanaan kinerja memegang posisi strategis dalam siklus manajemen pemerintahan dan menjadi landasan dalam pelaksanaan misi serta pencapaian visi organisasi. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya bersifat administratif, namun juga strategis dalam mengarahkan kinerja perangkat daerah secara terstruktur dan terukur.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 disusun sebagai bagian integral dari upaya perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan secara lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Sekretariat Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Bogor.

Dalam implementasinya, dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penyebaran dan sosialisasi dokumen ini kepada seluruh pemangku kepentingan agar tercipta pemahaman yang selaras dan keterlibatan aktif dalam mendukung keberhasilan pelaksanaannya.

Dengan demikian, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 memiliki tiga peran utama, yaitu:

1. Sebagai pedoman dan acuan dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah, baik dalam bentuk program, kegiatan, maupun sub kegiatan;
2. Sebagai pengikat sinergi antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah agar tujuan dan sasaran bersama dapat dicapai secara optimal;
3. Sebagai landasan perencanaan pembangunan tahap berikutnya, sehingga arah kebijakan dan pelaksanaan ke depan dapat lebih baik, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.

Namun dalam pelaksanaan rencana, tidak seluruh target dapat tercapai sesuai harapan. Beberapa kegiatan mengalami deviasi dari target, baik dalam bentuk capaian yang belum memenuhi target maupun yang telah melebihi target yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja dan penggunaan anggaran. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar

penting untuk penyusunan rencana tindak lanjut serta perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya.

Akhirnya, dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dapat melaksanakan tugas secara lebih terarah, terukur, dan bertanggung jawab, serta berkontribusi nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel di Kabupaten Bogor.





TERIMA KASIH

